

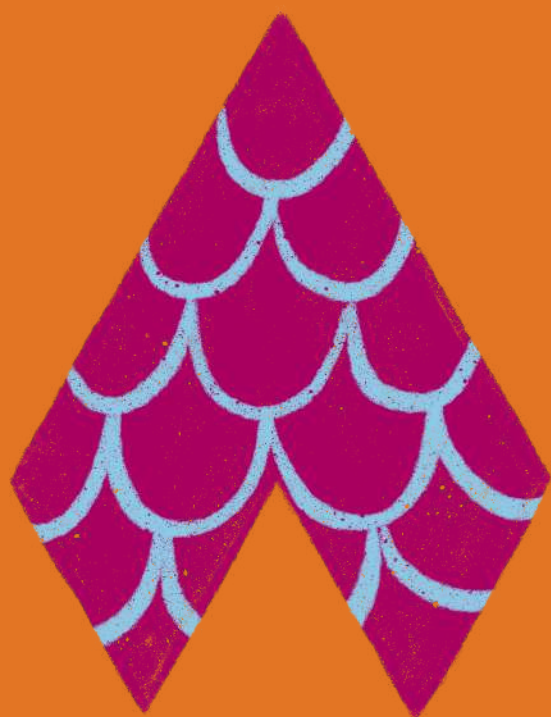


KATALOG

Keluarga Indonesia Inklusi

2022

Perkumpulan Pamflet Generasi
Linking and Learning Indonesia



KATALOG

Keluarga Indonesia Inklusi

2022



PAMFLET



Linking and Learning Indonesia

**KATALOG KELUARGA
INDONESIA INKLUSI 2022**

Seluruh teks © 2022

**Katalog Keluarga Indonesia
Inklusi 2022** berlisensi di bawah
Creative Commons Attribution
NonCommercial-ShareAlike 3.0
Unported License.

PENULIS

Wilda Yanti Salam

PENYUNTING

Muhammad Rizki,
Nabila Auliani Ruray,
Wilsa Naomi

PERANCANG GRAFIS

Mohammad Nur Fiqri

Ditulis dan diterbitkan oleh:

Perkumpulan Pamflet Generasi

Komplek Buncit Indah

Jalan Mimosa IV Blok E No. 17

Pejaten Barat, Pasar Minggu

Jakarta Selatan, 12510, Indonesia

www.pamflet.or.id

halo@pamflet.or.id /

pamfletindonesia@gmail.com

Daftar Isi

Kata Pengantar	7
Melangkah ke Rumah Keluarga Inklusi	8
Memahami Indonesia Inklusi	11
Peta Sebaran Indonesia Inklusi	13



01 RUMPUN EMPOWERMENT

Perempuan dengan Disabilitas Mendorong Ekonomi Inklusif	16
DIFABEL BLORA MUSTIKA	

Sukacita Setelah Kusta	18
PERMATA SULAWESI SELATAN	

Ada Apa dengan Disabilitas Mental?	21
PERHIMPUNAN JIWA SEHAT	

Mensosialkan Sindroma Down Melalui Let's Speak Up	24
YAPESDI	

Orang Muda dengan Disabilitas Sadar Politik	26
PERKUMPULAN INISIATIF BANDUNG	

Ruang Aman Bagi Lansia Perempuan Soliter dan Transpuan	29
ERAT INDONESIA	

Perjuangan Masyarakat Adat Memperjuangkan Kedaulatannya	32
AMAN SUMBAWA	



02 RUMPUN INFLUENCING

**Menghidupkan Pengetahuan
Luhur Masyarakat Adat Melalui
Proyek Lii Marapu** 38
SUMBA INTEGRATED DEVELOPMENT (SID)

**Mendorong Pemenuhan Hak
Sosial dan Ekonomi bagi
Lansia Penyintas 65** 40
KONSORSIUM BETTER TOGETHER

**Justice For Disability: Advokasi
Hak Disabilitas di Hadapan Hukum** 43
PUKAT UGM

**Bergandeng Tangan Mewujudkan
Ruang Kerja yang Aman** 46
PEREMPUAN MAHARDIKA

**Perlindungan Hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya bagi
Perempuan Pembela HAM** 50
KONSORSIUM IPROTECTNOW

**Buku Panduan Pertolongan
Pertama Psikologis Untuk
Minoritas Gender dan Seksualitas
Pembela HAM di Indonesia** 53
KONSORSIUM BRAVE

**Mak Ebah dan Berdayanya Lansia
Perempuan di Karawang** 56
PPSW PASOENDAN



03 RUMPUN INNOVATE AND LEARN

**Solidaritas Bersama
Membangun Kampung Katong** 62
KONSORSIUM KAMPUNG KATONG

**Memperjuangkan Kebijakan
Inklusif dan Pemberdayaan untuk
Pekerja dengan Disabilitas** 68
SEHATI SUKOHARJO

**Berdaya Bersama Tanpa
Pandang Gender dan Kasta** 72
PELITA SUMBA

Saling Terhubung, Saling Belajar 75
PAMFLET GENERASI

Ucapan Terima Kasih 78

Kata Pengantar

Selama kurang lebih lima tahun, para mitra penerima hibah Voice di Indonesia bekerja bersama melalui pendanaan Kementerian Luar Negeri Belanda untuk mendorong terwujudnya Indonesia yang inklusif. Mereka adalah organisasi masyarakat sipil, kolektif, aktivis, seniman, dan para pemangku hak yang bekerja melalui berbagai lini di tempat masing-masing. Seiring perjalanan kerja yang saling terhubung ini, kami membentuk Indonesia Inklusi. Sebuah komunitas, jaringan, dan keluarga tempat semua individu dan kelompok bisa terus terhubung dan belajar.

Setelah berjalan bersama-sama, kami menyadari pentingnya untuk membangun jejaring dan memperkenalkan diri kepada khalayak yang lebih luas. Kepada teman-teman sesama organisasi masyarakat sipil, pemerintah, donor, dan media. Sebab tujuan akhir yang kita sama-sama ingin capai hanya bisa terwujud melalui kolaborasi antarpihak dan tidak terbatas pada siklus program saja.

Katalog ini kami susun sebagai medium untuk memperkenalkan seluruh mitra yang saat ini sedang bergabung dalam Indonesia Inklusi. Medium ini terbatas pada apa yang tertulis saja, sehingga kami berharap para pembaca akan tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut atau bahkan menghubungi kontak yang tersedia. Mimpi kami, katalog ini membuka jalan bagi para pihak yang ingin berkolaborasi dengan para anggota Indonesia Inklusi.

Kami mengucapkan banyak terima kasih bagi seluruh mitra Indonesia Inklusi yang bersama-sama menyusun katalog dan juga pameran ini. Juga kepada tim Pamflet yang telah mengerahkan energinya dengan sepenuh hati. Seluruh rangkaian pameran dan katalog ini bisa terwujud atas dukungan dari Voice yang didanai oleh Kementerian Luar Negeri Belanda. Terima kasih kepada Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, terutama Mbak Siska Noya dan Mbak Giany Amorita yang setiap hari mendukung tim Pamflet mempersiapkan pameran ini.

Selamat membaca! Semoga semangat untuk saling terhubung dan saling belajar dari Indonesia Inklusi bisa terus menyebar dan berlanjut.

Salam,

Coory Yohana

Koordinator Pamflet Generasi

Fasilitator Linking and Learning Voice Indonesia



Melangkah ke Rumah Keluarga Inklusi

Katalog ini dirancang sebagai direktori informasi mengenai grantees Indonesia Inklusi dan program yang mereka kerjakan dalam kerangka Linking and Learning Voice Indonesia. Katalog ini juga menjadi bagian dari Pameran Suara Inklusi.

Dalam proses menyusunnya, saya menjadikan posisi sebagai pihak yang tidak mengikuti proses rekan-rekan grantees secara internal sebagai titik berangkat untuk menulis. Bahan-bahan untuk menulisnya bersumber dari Baseline Study dan Direktori Konten yang telah tersedia. Juga diperkuat oleh publikasi di website dan media sosial yang telah diproduksi masing-masing grantees. Rupanya, ada rambu-rambu berbeda yang diterapkan menyangkut program yang dikerjakan dan kebijakan publikasinya. Sehingga, dalam prosesnya sampai selesai, kami mengupayakan seluruhnya berdasar

dari persetujuan dari grantee bersangkutan. Perbedaan isu, latar lokasi dan kesibukan menjadikan proses peramuhan teks dan komunikasi antara saya dan grantee memiliki prosesnya tersendiri.

Katalog ini ditengahkan sebagai pintu masuk agar pihak-pihak yang tidak mengalami proses rekan-rekan keluarga indonesia inklusi bisa membacanya. Sedangkan untuk pamerannya, dirancang sebagai semacam wahana untuk mengalami program yang telah dikerjakan oleh para grantee melalui visualisasi produk pengetahuan yang telah diproduksi sebelumnya. Harapannya, dari katalog dan pameran ini, pihak-pihak yang mempunyai fokus isu dan kepentingan yang sejalan bisa berkolaborasi untuk memperkaya dan memperpanjang nafas perjuangan bersama.

Dalam tata letaknya, katalog ini disusun berdasarkan tiga rumpun utama sesuai dengan tema pemegang hak Linking and Learning Voice. Tentu saja, katalog dan pameran ini hanyalah sekeping dari perjuangan rekan-rekan grantee yang melampaui teks dan katalog yang terbatas ini.

Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman Pamflet yang begitu kooperatif dan menyokong kerja saya. Juga seluruh grantee yang bersedia saya tanya berulang kali dan sabar memberikan masukan sampai katalog ini selesai. Sebagai mata baru, saya belajar banyak sekali dari seluruh kerja rekan-rekan sekalian.

Semoga masih ada kesempatan belajar dan tumbuh bersama untuk kita semua.

Salam Indonesia Inklusi,

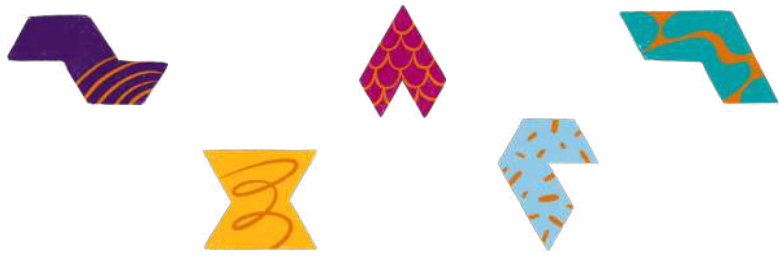
Wilda Yanti Salam

Penulis Pameran dan Katalog Keluarga Indonesia Inklusi 2022



“Diversity is being invited to the party, inclusion is being asked to dance”

VERNA MEYERS



Memahami Indonesia Inklusi

Indonesia Inklusi adalah ruang yang memungkinkan berbagai organisasi masyarakat sipil untuk saling belajar dan terhubung. Jaringan ini hadir atas konektivitas antar penerima hibah Voice. Voice adalah fasilitas hibah inovatif yang mendukung kelompok pemangku hak dalam upaya mereka untuk menuntut akses terhadap sumber daya, layanan sosial dan politik, serta ruang partisipasi politik untuk masyarakat sipil.

Di Indonesia, Voice bekerja dengan lima kelompok pemangku hak, yaitu:

1. Penyandang disabilitas;
2. Perempuan yang menghadapi eksploitasi, pelecehan dan/atau kekerasan;
3. Kelompok rentan yang terdiskriminasi usia, terutama orang muda dan lanjut usia;
4. Minoritas Gender dan Seksual;
5. Masyarakat adat dan etnis minoritas.

Indonesia Inklusi sendiri merupakan bagian dari Linking and Learning Indonesia yang didukung oleh Voice. Linking and

Learning berusaha mendorong kolaborasi, pertukaran, pembelajaran, inovasi, dan penerapan pengetahuan baru antar organisasi penerima hibah Voice, dengan tujuan mendorong perubahan transformatif dalam kehidupan kelompok pemangku hak.

Linking and Learning menjadikan penerima hibah Voice sebagai pusat berbagai aktivitas. Linking and Learning mempromosikan hubungan antara penerima hibah serta hubungan dengan komunitas lokal yang akan berlanjut di masa depan. Linking and Learning menyatukan kelompok pemangku hak, di mana mereka dapat belajar tentang situasi dan tantangan satu sama lain, untuk membangun solidaritas dan peluang untuk saling mendukung satu sama lain.

Linking and Learning adalah tentang komunitas. Apa yang kami lakukan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan semua pihak dapat berkomunikasi dan berkumpul.

Oleh karena itu, Indonesia Inklusi hadir untuk memahami konteks setiap komunitas yang terpinggirkan dan terdiskriminasi dalam kerangka interseksionalitas, serta memfasilitasi ruang di mana komunitas terpinggirkan dapat mengeksplorasi cara-cara untuk memanfaatkan kreativitas mereka dan mengubah aspirasi mereka menjadi tindakan dengan dampak sosial yang nyata. Hal ini memungkinkan proyek dan pendekatan yang berhasil untuk diperluas dan ditingkatkan.

Dengan kerangka interseksionalitas, berbagai aktivitas dilakukan dengan melibatkan setiap organisasi untuk meningkatkan kesadaran publik, serta mendorong partisipasi publik dalam menangani masalah sosial dan lingkungan.



Peta Sebaran Wilayah

DKI JAKARTA

- YAPESDI
- Perkumpulan Jiwa Sehat Indonesia
- IPAS Indonesia
- Perempuan Mahardhika
- Serikat Pekerja Nasional (SPN)
- Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI)
- Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Serikat SINDIKASI)
- Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga/ JALA PRT
- Konde.co
- Sanggar Swara
- JTID
- perEMPUan
- LBH APIK Jakarta
- Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa)

NUSA TENGGARA BARAT

- AMAN Sumbawa
- Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Mataram-Legal Aid and Consultation Bureau (BKBH) University of Mataram

NUSA TENGGARA TIMUR

- Sumba Integrated Development & Marungga Foundation
- PBH Nusra
- Lakoat.Kujawas
- Simpasio Institute
- Videoge
- PELITA Sumba
- Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi (Garamin)-(Disability Transformation Advocacy Movement for Inclusion)

JAWA TENGAH

- Difabel Blora Mustika
- Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN)
- SAMMI Institut Semarang
- Sekber '65
- Sehati Sukoharjo

JAWA BARAT

- PPSW Pasoendan Digdaya
- FITRA JABAR
- SAPA Institute
- Jaringan Advokasi Jawa Barat
- JAKATARUB
- Sinergantara
- RMI
- Yayasan Cahaya Inklusi Indonesia (CAI)- Foundation of Indonesian Inclusion Light)

JAWA TIMUR

- LBH Disabilitas Jawa Timur-(East Java Disability Legal Aid Institution)

DI YOGYAKARTA

- ERAT Indonesia
- PUKAT UGM
- The Caksana Institute

SULAWESI SELATAN

- PerMaTa Sulsel

SULAWESI TENGGARA

- Yayasan Lambu Ina

BENGGULU

- Yayasan PUPA Bengkulu

SUMATERA UTARA

- Serikat Perempuan Independen Labuhanbatu





Rumpun Empowerment

Empowerment dapat dimaknai sebagai proses menghampiri dan menyokong suara seseorang. Ia bukanlah sesuatu yang sekadar diberi, melainkan sebuah proses yang perlu dimiliki serta dikerjakan bersama. Kepemilikan terhadap hak bersuara akan menumbuhkan kepercayaan diri dan meningkatkan penghargaan terhadap diri sendiri. Inilah semangat dalam hibah *Empowerment* dari Voice yang percaya bahwa organisasi terdiri dari individu-individu, sehingga pemberdayaan secara individual adalah titik masuk yang penting. Oleh karena itu, setiap individu memiliki hak terhadap proses pemberdayaannya sendiri.

Di dalam rumpun *Empowerment* ini, terdapat tujuh pemangku hak dengan ragam aktivisme. Masing-masing menginisiasi program spesifik untuk pemangku haknya, dan mengelola kerentanan mereka dengan semangat interseksionalitas nan inklusif. Mulai dari pemberdayaan perempuan difabel melalui ekonomi inklusif (Difabel Blora Mustika); pemberdayaan pemuda yang pernah mengalami kusta (PerMaTa Sulawesi Selatan); pemenuhan jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas mental (Perhimpunan Jiwa Sehat); mengarusutamakan peningkatan kapasitas untuk anak dengan sindroma Down (YAPESDI); pemenuhan hak politik orang muda dengan disabilitas (Perkumpulan Inisiatif); ruang aman bagi lansia soliter dan transpuan (ERAT Indonesia); serta perjuangan masyarakat adat mempertahankan kedaulatannya (AMAN Sumbawa).

Perempuan dengan Disabilitas Mendorong Ekonomi Inklusif



Aktivitas ibu-ibu DBM dalam membuat aneka produk wirausaha

Stigma terbesar yang dibebankan pada perempuan dengan disabilitas adalah bahwa mereka tidak berdaya, akan terus bergantung dengan orang lain, dan merupakan aib di lingkungan terdekatnya. Bahkan, dalam lingkup terkecil seperti keluarga inti pun, sejumlah perempuan penyandang disabilitas mengalami diskriminasi melalui penghapusan nama dari Kartu Keluarga.

Difabel Blora Mustika (DBM), organisasi yang didirikan oleh dan untuk teman-teman disabilitas, tidak diam saja atas kondisi ini. Dalam kerja-kerjanya, mereka melakukan pendampingan dan pemberdayaan perempuan dengan disabilitas agar tergerak untuk mewujudkan dan berpartisipasi dalam terciptanya ekonomi inklusif.

Untuk memudahkan perempuan dengan disabilitas dalam mempelajari kewirausahaan, DBM membentuk Perdifa (Perkumpulan Perempuan Difabel) Jepon, Blora, sebagai ruang untuk beragam peningkatan kapasitas. Sejauh ini, pembelajaran seperti dasar-dasar kewirausahaan, pemasaran produk, hingga optimalisasi sarana online diiringi dengan pelatihan internal seperti manajemen organisasi.

Kini, produk perempuan dengan disabilitas dalam naungan DBM mencakupi kain batik, olahan anyaman bambu, teh mengkudu, dsb. Praktik ekonomi inklusif ini berjalan

bersamaan dengan proses sosialisasi mengenai pelibatan perempuan dengan disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat yang sering dilaksanakan Perdifa maupun DBM, misalnya pada September 2022 lalu di Kecamatan Ngawen, Blora. Perempuan dengan disabilitas menjadi berdaya dan bisa membuktikan nilai diri mereka yang selama ini diabaikan lingkungan sekitar.

TANTANGAN ORGANISASI

- Sulitnya untuk meyakinkan penyandang disabilitas bahwa mereka bisa memberdayakan dirinya, baik secara ekonomi ataupun untuk digdaya dalam kehidupan sehari-hari.
- Dalam upaya membangun kerjasama dengan organisasi disabilitas lain, belum ada kepercayaan bahwa mereka dapat membangun solidaritas sesama kelompok disabilitas.
- Tokoh masyarakat dan pemerintah setempat belum memahami isu disabilitas, sehingga implementasi peraturan daerah terkait isu disabilitas belum optimal. Terdapat juga peraturan daerah yang menghambat, seperti Perda Blora No. 14 tahun 2014 yang tidak memperbolehkan organisasi atau lembaga untuk menerima bantuan sosial.
- Dukungan dari pemerintah terhadap kerja-kerja DBM sangat bergantung dengan pergantian aktor politik yang sifatnya dinamis dan tidak pasti.
- Tidak ada upaya pendataan penyandang disabilitas yang menyeluruh, sehingga DBM harus berinisiatif mengupayakan pendataan.

INFORMASI TAMBAHAN

• Difabel Blora Mustika (DBM)

WEBSITE

www.difabelblora.blogspot.com

MEDIA SOSIAL

Instagram: @difabelbloramustika_

ALAMAT YAYASAN

Jl. Mr. Iskandar No.123a, Dluwungan, Mlangsen,
Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58216

PERMATA SULSEL

Sukacita Setelah Kusta

“Di depan banyak orang, dokter umum memvonis dengan lantang dan tanpa basa-basi: saya kena kusta atau kandala. Saya kaget dan bingung. Sulit mencerna maksud dokter tersebut karena kusta dalam bahasa Makassar tergolong kasar bagi orang setempat. Saya langsung berdiri lalu keluar dari klinik. Perasaan saat itu bagaikan petir di siang hari. Saking sulitnya mencerna kondisi tersebut, saya menangis tersendu-sendu.”



Kelompok belajar SIPAKATAU

Pengalaman Ermawati di atas mewakili betapa terpuruknya orang yang pernah mengalami kusta (OYPMK). Perlu bertahun-tahun—dan kambuhnya kusta sekali lagi setelah sempat sembuh—hingga Ermawati bisa bangkit dari kusta dan menjadi aktivis komunitas.

SIPAKATAU (Suara Pemuda Kusta Yang Aktif, Terampil dan Unggul) merupakan program yang mewadahi pegiat-pegiat seperti Ermawati dalam memberdayakan orang muda OYPMK (Orang Yang pernah Mengalami Kusta) untuk bisa mandiri dan menerima dirinya. Program ini digagas oleh Perkumpulan Mandiri Kusta (PerMaTa), yakni organisasi nirlaba yang berfokus pada perjuangan melawan stigma dan diskriminasi terhadap orang yang sedang atau pernah mengalami kusta agar memiliki kehidupan yang bermartabat.

Program ini dimulai dengan melakukan pengambilan data dan pencarian orang-orang muda OYPMK di beberapa Puskesmas di Kabupaten Gowa:

Bajeng, Pallangga dan Kanjilo. Setelah menemukan pemuda kusta yang tertarik untuk menjadi bagian dari SIPAKATAU, PerMaTa mengadakan serangkaian kamp pelatihan untuk tim SIPAKATAU. Proses ini diperkaya pameran, penyusunan buku alumni SIPAKATAU, dan penulisan laporan akhir bersama.

Saat ini, alumni SIPAKATAU melanjutkan tongkat estafet perjuangan dengan menjadi fasilitator untuk program baru yang bertalian dengan spirit PerMaTa, yakni kelompok pemuda bernama PAKARENA. Mereka berharap, melalui dukungan VOICE, mereka bisa melibatkan lebih banyak orang muda yang menyadari kemampuan dan nilai diri mereka, serta berkontribusi dalam perjuangan mengakhiri diskriminasi dan stigma terhadap teman-teman sedang atau pernah mengalami kusta.

TANTANGAN ORGANISASI

- Stigma yang masih sangat kuat dari masyarakat terhadap penyakit kusta menyebabkan OYPMK kehilangan kepercayaan diri dan mengisolasi diri.
- Selain mempengaruhi kehidupan OYPMK itu sendiri secara keseluruhan, stigma terhadap kusta yang diinternalisasi oleh OYPMK juga menjadi hambatan PerMaTa SulSel dalam merekrut kawan baru.
- Layanan kesehatan terkait kusta di Sulawesi Selatan belum bisa diakses secara merata.

INFORMASI TAMBAHAN

• Perkumpulan Mandiri Kusta (PerMata) Sulawesi Selatan

WEBSITE

www.permatasulsel.com

MEDIA SOSIAL

Instagram: @permatanasional

ALAMAT YAYASAN

Ville Park B4 No. 10A Barombong, Makassar

Ada Apa Dengan Disabilitas Mental?

Puspa merupakan perempuan muda penyandang disabilitas mental (PDM). Setiap hari, ia berjuang untuk menjaga kesehatan mentalnya tetap stabil dengan mengonsumsi obat-obatan berdasarkan resep dokter. Ia mengandalkan kartu BPJS untuk bisa menebus obat yang ia butuhkan. Malangnya, kebijakan pemerintah terbaru mengatakan bahwa hanya setengah dari obat tersebut yang bisa dibayar melalui BPJS dan sisanya harus ditanggung sendiri oleh Puspa.

Puspa tidak mampu menebus sisa obat itu, dan harus pulang dengan rasa sedih juga harapan semoga halusinasinya tidak kambuh. Celakanya, obat yang kurang menyebabkan Puspa harus kembali menderita halusinasi yang membuatnya semakin frustrasi dan kelelahan. Di sisi lain, keluarganya juga tak mampu menebus obat mahal yang Puspa butuhkan. Padahal, bagi penyandang disabilitas mental seperti Puspa, mengonsumsi obat-obatan adalah salah satu upaya untuk terus bisa bertahan hidup.



We apologize Miss. but if you use BPJS,
you can't get that medicine here

Cuplikan serial film pendek Ada Apa dengan Disabilitas Mental edisi BPJS

Pengalaman Puspa merupakan bagian dari serial film Ada Apa Dengan Disabilitas Mental. Serial ini diproduksi oleh Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) atau Indonesia Mental Health Association (IMHA) agar masyarakat bisa mengetahui kondisi dan hambatan sehari-hari PDM. Pengetahuan ini semakin relevan mengingat bahwa cakupan terma disabilitas yang mengikutsertakan disabilitas mental saja masih jarang diketahui. Kurangnya pengetahuan terkait disabilitas mental juga berkontribusi besar ke dunia kerja yang belum inklusif bagi pekerja dengan disabilitas mental.

Adapun PJS merupakan organisasi yang mengupayakan advokasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas mental di Indonesia. Organisasi yang berdiri sejak 2008 ini merupakan organisasi pertama yang diinisiasi dan dijalankan oleh penyandang

disabilitas mental. Dengan dukungan dari VOICE, PJS melakukan perluasan wilayah jangkauan selain Jakarta dengan membentuk PJS Blitar, PJS Malang, dan PJS Yogyakarta.

Dalam sebaran jaringan kerjanya, PJS melakukan pendampingan bagi teman-teman PDM, advokasi kebijakan disabilitas terhadap pemerintah, dan menghadirkan ruang-ruang diskusi. Penyebarluasan informasi juga dilakukan melalui produksi konten berupa teks, audio, dan visual terkait disabilitas mental yang bisa meningkatkan kualitas hidup PDM. Saat ini, PJS tengah aktif mensosialisasikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan BPJS Kesehatan yang bisa dipergunakan untuk memeriksakan kesehatan mental. PJS berharap agar masyarakat, khususnya di ranah akar rumput, bisa menjadi support system bagi PDM yang ada di sekitarnya.

TANTANGAN ORGANISASI

- Stigma terhadap disabilitas mental masih mengakar dan pengetahuan terkait disabilitas mental jarang diketahui masyarakat. Akibatnya, tindak tidak manusiawi kerap dilakukan terhadap orang dengan disabilitas mental, seperti pada kasus-kasus di mana penyandang disabilitas mental dipasung dan dikurung.
- Pemerintah belum sepenuhnya mendukung pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas mental, seperti penyediaan fasilitas kesehatan yang layak dan pengobatan.
- Pemerintah masih diskriminatif terhadap partisipasi politik penyandang disabilitas mental, karena dianggap kurang berhak memilih dan bersuara
- Sebagai organisasi yang dikelola dan dijalankan oleh penyandang disabilitas mental, ketika mereka *relapse/kambuh*, kegiatan yang sebelumnya telah dirancang seringkali perlu disesuaikan.

INFORMASI TAMBAHAN

• Indonesia Mental Health Association (Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia)

WEBSITE

www.pjs-imha.or.id

MEDIA SOSIAL

Instagram: @pjs.imha

ALAMAT YAYASAN

Jl. Pulo Asem Timur VI No. 5 RT. 5/RW. 2, Jati, Kec. Pulo Gadung,
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220

Mensosialkan Sindroma Down Melalui Let's Speak Up

Rizqi adalah anak dengan sindroma Down, yaitu kelainan genetik yang dibawa sejak lahir pada kromosom 21 yang menyebabkan keterlambatan pertumbuhan fisik, mental, dan ciri fisik yang khas. Ketika melahirkan Rizqi, Bu Shabariyah berusaha untuk membuat orang-orang di sekelilingnya nyaman untuk membicarakan kondisi anaknya. Kedua kakak Rizqi juga terlibat dalam mengantar Rizqi setiap ke fisioterapi.

Kisah Rizqi berbeda dengan beragam kasus di luar sana, di mana tidak jarang ditemukan bahwa anak dengan sindroma Down 'disembunyikan' oleh keluarganya karena kekhawatiran takkan diterima oleh masyarakat. Inilah alasan YAPESDI (Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia)–sebuah yayasan nirlaba yang mempunyai fokus kerja memberdayakan anak, remaja dan dewasa dengan sindroma Down atau disabilitas intelektual lainnya–menginisiasi Let's Speak Up atau Ayo Ngomong.

Kelas Let's Speak Up memberikan pelatihan dan pendampingan kepada orang muda dengan disabilitas intelektual, terutama orang muda dengan sindroma Down, agar dapat menerima sendiri dan membangun keterampilan sosial. Kepercayaan diri yang timbul dari

sini kemudian menjadi basis agar peserta berani berbicara, berekspresi, berpendapat, dan bisa menjadi *self-advocate* untuk dirinya sendiri.

Let's Speak Up menjadi ruang yang mempertemukan Rizqi dan anak-anak dengan sindroma Down dari berbagai daerah di Indonesia untuk saling berbagi kisah dan asa. Melalui berbagai kelas yang berlangsung secara daring, pendamping/orang tua masing-masing anak juga turut serta. Sebab, keluarga adalah *support system* pertama yang berperan dalam menerima dan memahami orang muda yang memiliki kebutuhan khusus ini. Keluarga dan lingkungan pergaulan menjadi ruang yang berperan aktif dalam mengoptimalkan potensi orang muda dengan sindroma Down.



Salah satu sesi kelas Let's Speak Up!

TANTANGAN ORGANISASI

- Stigma bahwa anak dengan sindroma Down tidak mampu berpikir dan belajar masih mengakar di masyarakat, pemerintah, dan bahkan di tingkat keluarga.
- Anak dengan disabilitas intelektual hampir tidak pernah diterima di satuan pendidikan, bahkan di sekolah yang menganut kurikulum Pendidikan Inklusif, sehingga tidak ada ruang untuk anak dengan sindroma Down tumbuh dan berkembang dengan anak lainnya.
- Isu disabilitas intelektual, khususnya sindroma Down, masih menjadi isu yang jarang didengar dan diketahui masyarakat. Dalam implementasi intervensi, ini seringkali berpengaruh kepada jangkauan kampanye dan rekrutmen sukarelawan muda.
- YAPESDI menjalankan program dan kerja-kerjanya berbasis proyek, sehingga mereka terbatas dari segi pendanaan. Ini berdampak pada belum memungkinkannya mereka melakukan penelitian secara mandiri.

INFORMASI TAMBAHAN

• Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia (YAPESDI)

MEDIA SOSIAL

Instagram: @yapesdi

ALAMAT YAYASAN

Jl. Berdikari No. 28 RT. 003/014 Rawa Badak Utara,
Koja Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Orang Muda dengan Disabilitas Sadar Politik



Dokumentasi *Workshop Political Parenting* pada Agustus 2022 (1)

Orang muda yang hidup dengan disabilitas masih mendapatkan diskriminasi berlapis, bahkan dalam hak mereka untuk berdemokrasi. Padahal, sebagai warga negara, mereka memiliki hak untuk bersuara, hak atas kebebasan berpolitik, dan hak untuk dipilih serta memilih dalam pesta demokrasi.

Dari penelitian dan data yang dimiliki oleh Cahaya Inklusi Indonesia (CAI), partisipasi pemilih dengan disabilitas masih rendah, terlebih untuk orang muda dengan disabilitas. Orang muda dengan ragam disabilitas memang memiliki kebutuhan yang beragam untuk bisa berpartisipasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Bahkan, selain akomodasi yang inklusif, orang muda dengan disabilitas membu-

tuhkan informasi terkait sarana Pendidikan Politik agar dapat berpartisipasi secara bermakna.

Dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi politik orang muda dengan disabilitas, dibutuhkan partisipasi dan pelibatan orang tua atau keluarga pendamping, termasuk organisasi penyandang disabilitas itu sendiri. Kebutuhan ini diperkuat oleh hasil penelitian dari Perkumpulan Inisiatif Bandung yang menunjukkan bahwa orang tua berpengaruh besar dalam menentukan pilihan terhadap pemimpin di tingkat daerah dan pusat, karena mereka yang memberikan informasi terkait pemilu, partai, dan kandidat calon pemimpin, termasuk janji-janji politik di tingkat daerah dan pusat kepada anak-anaknya.



Dokumentasi Workshop Political Parenting pada Agustus 2022 (2)

Untuk itu, Perkumpulan Inisiatif dan CAI mengadakan berbagai program sebagai sarana diseminasi pengetahuan dan pendidikan politik terhadap orang muda penyandang disabilitas. Pada Agustus 2022 lalu, mereka menyelenggarakan lokakarya *Political Parenting* sebagai sarana pendidikan politik berbasis keluarga yang melibatkan orang tua dan guru/tenaga Pendidikan SLB-A bagi anak dengan penyandang disabilitas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) pun turut hadir dalam prosesnya untuk memberikan gambaran umum terkait pelaksanaan pemilu 2024, dan kesempatan bagi disabilitas untuk dapat terlibat aktif di dalam setiap tahapan kepemiluan. Terlepas daripada itu, untuk memberikan motivasi bagi orang tua dan guru, turut hadir mantan kandidat tokoh penyandang disabilitas yang pernah mengikuti kandidasi elektoral di tahun 2014, Bapak Jumono, dan 2019 Ibu Tanty Tri Santinah dalam mengenalkan semangat perjuangan disabilitas secara luas dengan menempuh jalur partai politik maupun non-partai politik.

Lokakarya ini diakhiri dengan pengenalan aplikasi Violet (Voter Inclusiveness Political Learning Terminal) yang memudahkan penyandang disabilitas mengakses edukasi politik—khususnya terkait hak politik dan kewarganegaraan. Karena terbuka untuk non-disabilitas, aplikasi ini diharapkan menjadi kanal belajar bersama yang bisa menghubungkan satu sama lain, terlepas dari disabilitas.

TANTANGAN ORGANISASI

- Walaupun kualitas hidup penyandang disabilitas terpengaruh langsung oleh kebijakan pemerintah di berbagai sektor, hak politik orang muda dengan disabilitas belum bisa terpenuhi karena sulitnya akses terhadap pendidikan politik.
- Selain akses terhadap pendidikan politik, orang muda dengan disabilitas tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar bersama dan bertukar pikiran dengan orang muda lainnya.
- Partisipasi politik yang mendasar—seperti partisipasi dalam pemilihan umum—sulit dilakukan karena minat dan perhatian anak muda disabilitas itu sendiri, daya dukung dari orang tua dan guru di dalam mengakses layanan Pendidikan politik, saluran-saluran aspirasi yang disediakan oleh penyelenggara pemilihan umum dan peserta pemilihan umum ie. Partai Politik yang belum ramah bagi disabilitas, dan sulit dipahami.

INFORMASI TAMBAHAN

• Perkumpulan Inisiatif Bandung

WEBSITE

www.inisiatif.org

MEDIA SOSIAL

Instagram: @perkumpulan.inisiatif

Facebook: Inisiatif

Twitter: @inisiatif_org

ALAMAT YAYASAN

Jl. Suryalaya XVIII No. 23, Cijagra, Kec. Lengkong,
Kota Bandung, Jawa Barat 40265

Ruang Aman Bagi Lansia Perempuan Soliter dan Transpuan

Lansia merupakan bagian dari kelompok rentan karena minimnya pelibatan lansia dalam bermasyarakat. Kerentanan ini berlipat ganda ketika lansia tersebut merupakan lansia perempuan, transpuan, ataupun soliter alias tinggal seorang diri. Selain mengalami diskriminasi, lansia perempuan soliter dan transpuan beresiko tidak mempunyai akses untuk bantuan sosial dan layanan kesehatan.

Menanggapi ini, Elderly Rights Advocacy & Treatments (ERAT) Indonesia bersama Waria Crisis Center (WCC) membentuk Senior Support Center (SSC) Teratai di Yogyakarta, selain menghadirkan aksesibilitas untuk bantuan dan perawatan kesehatan, SSC Teratai menjadi ruang aman yang menjembatani lansia perempuan soliter dan transpuan untuk melakukan advokasi dan saling mendukung satu sama lain. Kerjasama ERAT dan WCC juga mendorong lahirnya kebijakan yang pro-lansia di tingkat lokal seperti kabupaten/kota, serta komunitas yang lebih kecil seperti kampung, desa, atau dusun.



Diskusi dengan Lansia Penyintas '65



Kebersamaan saat Launching Women Crisis Center (WCC)

ERAT Indonesia merupakan lembaga perlindungan dan advokasi hak lansia agar hidup secara layak dan bahagia. Lembaga yang berdiri sejak Maret 2019 ini juga menjadi pusat layanan dan dukungan lansia dan berbasis di Yogyakarta. Waria Crisis Center (WCC) adalah wadah yang didirikan untuk membantu dan memfasilitasi transpuan di Yogyakarta yang menghadapi krisis.

Sebagai program jangka panjang yang dijalankan secara bertahap, pada enam bulan pertama ini, ERAT Indonesia dan WCC mengupayakan penguatan kapasitas untuk lansia penggerak yang berbasis di komunitas dan bagi orang muda selaku pendukung lansia yang mengelola data dan pusat informasi atau hotline.

Kiprah salah satu lansia transpuan penggerak yang mengupayakan kehadiran SSC Teratai, Rully Malay, didokumentasikan dalam film pendek “Lansia dan Lahan: Cerita dari Yogyakarta”. ERAT bekerjasama dengan PPSW Pasoendan Digdaya, Sedap Films, dan difasilitasi oleh Pamflet Generasi dalam menyampaikan realita hidup Rully sebagai koordinator WCC yang giat merawat dan memperjuangkan hak lansia transpuan.

TANTANGAN ORGANISASI

- Nyaris tidak ada lembaga/platform yang berfokus pada perlindungan dan pemenuhan hak lansia untuk hidup layak, sehat, bermartabat dan bahagia di Indonesia.
- Pemerintah dan masyarakat awam banyak yang belum punya kesadaran dan pemahaman akan pemenuhan dan perlindungan hak-hak lansia.
- Tingginya angka lansia soliter beresiko menghambat kualitas hidup dan pemenuhan hak lansia.
- Masih kuatnya diskriminasi, dan tak jarang kekerasan langsung terhadap transpuan/waria di Indonesia yang juga berakibat pada semakin rentannya lansia transpuan/waria dalam konteks tersebut.
- Lansia transpuan menghadapi kesulitan yang berlapis ketika hendak mengakses layanan kesehatan dan bantuan sosial.
- Kondisi kesehatan yang menurun dan menguatnya hambatan fisik pada sebagian besar lansia menghadirkan kendala partisipasi/keterlibatan secara utuh dalam periode/jangka waktu pelaksanaan program.

INFORMASI TAMBAHAN

• ERAT Indonesia

MEDIA SOSIAL

Instagram: @eratindonesia

• Waria Crisis Centre

MEDIA SOSIAL

Instagram: @wccyogya

AMAN SUMBAWA

Perjuangan Masyarakat Adat Memperjuangkan Kedaulatannya

Masyarakat adat kerap menjadi korban pembangunan. Dari diskriminasi terhadap kepercayaan adat, penggusuran dan pembebasan lahan, hingga minimnya akses layanan karena ketiadaan KTP; ruang hidup masyarakat adat dipersempit, dieksploitasi, dan mengalami desakralisasi. Masyarakat adat Cek Bocek Selesek Reen Sury di Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu yang mengalami ini.

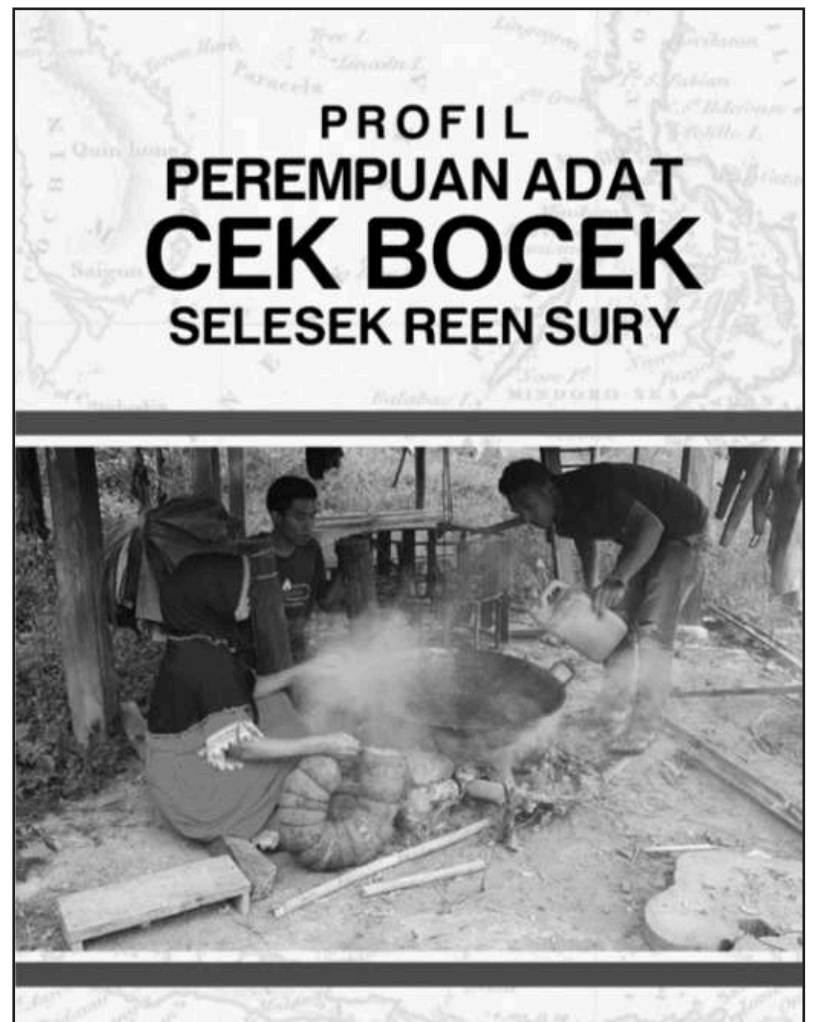
Dengan hadirnya perusahaan tambang, masyarakat adat yang tumbuh dan merawat alamnya sejak 1512 ini terancam kehilangan wilayah adat, hutan adat, dan bahkan kuburan leluhur. Tidak diam, masyarakat adat Cek Bocek terus berupaya untuk mencari keadilan atas hak-hak mereka—atas apa yang memang adalah miliknya.



Loklatih Pengembangan Produk di Komunitas Adat Ponan Desa Poto Moyo Hilir (1)

Sebagai aliansi yang bekerja untuk menguatkan masyarakat adat di Kabupaten Sumbawa, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah Sumbawa (AMAN Sumbawa) turut menguatkan perjuangan masyarakat adat Cek Bocek. AMAN Sumbawa melakukan kerja-kerja riset yang hasilnya digunakan sebagai basis data untuk advokasi hak masyarakat adat ke pemerintah dan pihak lainnya.

Pada 2021, AMAN Sumbawa merilis 7 buku berisi profil masyarakat adat dan 10 profil perempuan adat yang melibatkan perempuan adat Cek Bocek. Selain sejarah perempuan adat Cek Bocek itu sendiri, buku ini mengisahkan andil perempuan adat menyoal tata ruang wilayah adat, konservasi alam, hingga dalam pemerintahan desa. Pengetahuan dari buku ini kini terdiseminasi lebih jauh karena terintegrasi ke dalam bahan materi mengenai masyarakat adat di kurikulum sekolah dasar lokal.



Salah satu buku yang diproduksi oleh AMAN Sumbawa



Loklatih Pengembangan Produk di Komunitas Adat Ponan Desa Poto Moyo Hilir (2)

Upaya AMAN Sumbawa juga dilanjutkan dengan pembentukan BUMMA (Badan Usaha Milik Rakyat Masyarakat Adat) pada setahun belakangan, dengan kedaulatan perempuan adat sebagai fokus utama. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang mengisolir, dampak krisis iklim, dan wilayah adat yang kerap terancam; kedaulatan pangan yang dimotori perempuan dianggap sebagai kunci untuk penguatan ekonomi masyarakat adat di Kabupaten Sumbawa. Ketika inisiatif akar rumput seperti ini dilakukan bersamaan dengan upaya advokasi, kesejahteraan masyarakat adat—seperti Cek Bocek dan ratusan lainnya yang terancam—harapnya menjadi lebih dekat.

TANTANGAN ORGANISASI

- Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat tidak kunjung disahkan, sehingga tidak ada perlindungan hak adat oleh pemerintah di tengah gencarnya agenda pembangunan.
- Nihilnya perlindungan hukum diperparah sejumlah kebijakan yang tidak berpihak terhadap masyarakat adat. Salah satu peraturan daerah yang mendiskriminasi masyarakat adalah Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2015 mengenai Lembaga Adat Tana Samawa yang mengatakan bahwa masyarakat adat tidak boleh ada lagi.
- Inisiatif akar rumput seringkali terhambat minimnya kesediaan akomodasi dan sulitnya akses terhadap lokasi-lokasi masyarakat adat.
- Masyarakat adat memerlukan peningkatan kapasitas dalam berbahasa dan literasi digital agar dapat memaksimalkan berbagai inisiatif di tengah keterbatasan mobilitas.

INFORMASI TAMBAHAN

• Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumbawa

WEBSITE

www.aman.or.id

MEDIA SOSIAL

Instagram: @rumah.aman

ALAMAT YAYASAN

Jalan Tebet Timur Dalam Raya No. 11A Kel. Tebet Timur,
Kec. Tebet, Jakarta Selatan, Indonesia, Kode Pos – 12820





Rumpun Influencing

Hibah *Influencing* memayungi proses di mana pemangku hak atau perwakilan mereka menggunakan serangkaian alat lobi dan advokasi guna mempengaruhi pihak-pihak yang mampu mendukung pemenuhan hak masing-masing kelompok. Pihak ini berada pada tataran individu, keluarga, komunitas, pemimpin agama, swasta, hingga pengambil kebijakan atau pemerintah. Muara dari intervensi gabungan adalah terpenuhinya hak ragam kelompok rentan dan minoritas sebagai warga negara yang setara; kesempatan dalam partisipasi politik, ekonomi dan sosial; serta tersedianya akses layanan dan sumber daya.

Rumpun *Influencing* terdiri delapan organisasi dan/atau konsorsium yang menggagas program dengan semangat kolaborasi interseksional. Ada Sumba Integrated Development (SID) yang bergerak di isu masyarakat adat; Konsorsium Better Together dengan pemenuhan hak lansia penyintas 65; PUKAT UGM yang melakukan advokasi hak disabilitas di hadapan hukum; Perempuan Mahardika dalam perjalanan memperjuangkan ruang aman dan kesetaraan gender bagi buruh perempuan; Konsorsium iProtectNow dengan upaya perlindungan dan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob) perempuan pembela HAM, Konsorsium BRAVE melalui upaya pertolongan psikologis bagi pembela HAM Minoritas Gender dan Seksual; hingga PPSW Pasoendan dengan upaya intervensi pemerintah desa untuk hidup aman dan bahagia bagi lansia di Karawang.

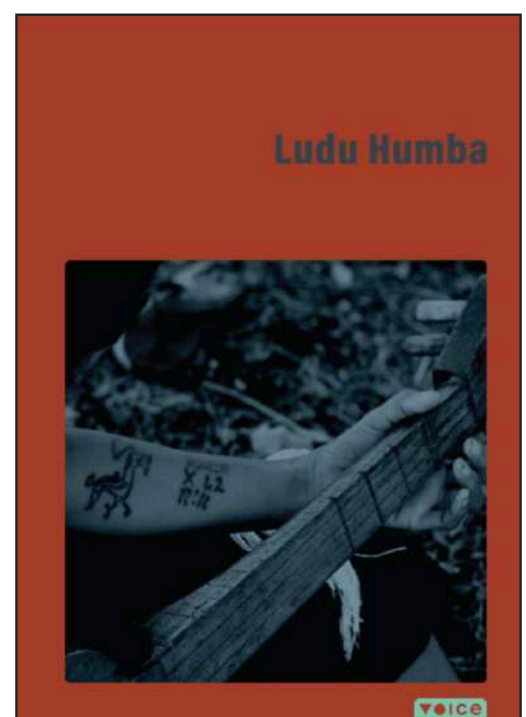
SUMBA INTEGRATED DEVELOPMENT (SID)

Menghidupkan Pengetahuan Luhur Masyarakat Adat Melalui Proyek Lii Marapu

Meskipun Marapu merupakan agama asli Nusantara yang bertahan dari masa ke masa, pengetahuan terkait nilai-nilai, ritual dan berbagai aspek dari Marapu terancam terkikis. Sumba Integrated Development (SID) dan Yayasan Masyarakat Adat Tangguh Sejahtera (Marungga) Foundation menanggapi permasalahan ini dengan program Lii Marapu yang mengarsipkan dan mendokumentasikan kepercayaan Marapu di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.

Upaya pendokumentasian melalui audio visual dan teks ini dilakukan untuk menjembatani transfer budaya dan pengetahuan leluhur yang optimal dan dapat diakses oleh generasi yang lebih muda. Musik dan ritual Marapu menjadi dua fokus utama. Lebih jauh, program ini bertujuan meningkatkan akses sosial dan pendidikan bagi penghayat kepercayaan Marapu untuk memperkuat partisipasi politik mereka.

Secara organisasi, SID merupakan organisasi yang berfokus pada advokasi dan pengadaan pendidikan



Sampul Buku Ludu Humba

yang inklusif dengan tujuan pemberdayaan masyarakat adat. Sementara, Marungga Foundation adalah lembaga yang berfokus pada advokasi dan distribusi pengetahuan masyarakat adat.

Selain pendokumentasian audiovisual, setahun sebelumnya pada 2021, SID melakukan revitalisasi aset budaya masyarakat Marapu dengan mengumpulkan literatur budaya berupa koleksi 26 buku oleh 5 peneliti Sumba (13 belum diterbitkan, 13 sisanya dicetak ulang dengan izin dari penulis). Selain buku, SID juga mengembangkan arsip digital berupa “Arsip Audio Visual Aset Budaya Tak-benda Sumba Timur” yang akan menjadi sumber daya utama untuk advokasi dan pengembangan program pendidikan tentang budaya Marapu.

TANTANGAN ORGANISASI

- Pergantian aktor politik yang dinamis menghambat proses advokasi dan kerap memaksa upaya advokasi untuk kembali dimulai dari awal.
- Walaupun kebijakan pemerintah terkait penggunaan dana desa dan dana alokasi khusus relevan bagi kerja SID, kebijakan tersebut kurang menyasar inisiatif akar rumput yang mengangkat isu anak.
- Pengetahuan terkait hak dan peningkatan kapasitas masih sulit diakses bagi penghayat kepercayaan Marapu dan masyarakat adat di Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat Daya, khususnya Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kota Waingapu, Umalulua Laura, Wewewa Barat, Kodi, dan Kodi Utara.

INFORMASI TAMBAHAN

• Sumba Integrated Development (SID)

WEBSITE

www.sidsumba.org

MEDIA SOSIAL

Instagram: @sumbaintegrated

ALAMAT YAYASAN

Jalan Jati No. 2 Kampung Baru, Kambajawa,
Kec. kota Waingapu, Waingapu, Nusa Tenggara Tim. 87116

Mendorong Pemenuhan Hak Sosial dan Ekonomi bagi Lansia Penyintas 65

Seperti lansia lainnya, Theresia menjadi bagian dari kelompok rentan berdasarkan usia karena minimnya akses sosial, ekonomi, dan budaya. Kerentanan ini berlipat ganda bagi Theresia sebagai keluarga korban tragedi 1965-66. Orang tua Theresia adalah korban, dan ketika itu ia masih kecil. Saat ini, beliau harus bertahan hidup dengan stigma yang diletakkan kepada mereka sebagai eks tapol (tahanan politik) di usianya yang senja.

Walau stigma tersebut masih melekat dalam 57 tahun terakhir, ada orang-orang muda seperti Yuli yang datang dengan rasa kemanusiaan untuk mendampingi lansia di Sikka. Mereka dipertemukan oleh upaya Konsorsium Better Together yang memperjuangkan pendampingan lansia penyintas untuk memperoleh akses sosial, ekonomi, dan budaya di Surakarta dan Karanganyar (Jawa Tengah) serta Sikka (Nusa Tenggara Timur). Dalam prosesnya, keterlibatan orang muda diharapkan dapat membangkitkan kesadaran dan kepedulian untuk pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Konsorsium Better Together juga mendorong tumbuhnya kepedulian anak muda dan keterlibatan mereka dalam permasalahan hak asasi manusia, utamanya, terhadap lansia, serta memperluas jaringan anak muda di tingkat nasional.



Yuli, dari PBH Nusra belajar menenun

Program ini juga menyasar aktor-aktor kunci yang memegang peran dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan lansia, orang muda, dan pelanggaran HAM.

Secara manajemen, konsorsium ini dikelola oleh Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa), organisasi sumber daya masyarakat sipil (OSMS) yang mendukung inisiatif lokal dalam kerangka keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kelestarian lingkungan. IKa bermitra dengan Sekber '65 di Surakarta dan PBH Nusra di Sikka yang menggiatkan melakukan pendampingan untuk penyintas tragedi '65.



Pendampingan layanan berobat bagi lansia melalui mekanisme buku hijau LPSK



Mama Theresia dan Suami di rumahnya

SEKBER '65

SekBer '65 adalah organisasi masyarakat yang awalnya didirikan pada tahun 2005 sebagai sekretariat bersama para korban tragedi 1965/1966. Dalam Better Together, mereka melakukan pendokumentasian pengetahuan dan ingatan kelompok lansia korban pelanggaran HAM berat masa lalu di Surakarta dan Karanganyar. Mereka melakukan rangkaian peliputan profil dan kisah hidup para lansia dan menerbitkannya dalam ragam teks dan buku.

Selain itu, Sekber '65 membentuk Forum Generasi Muda (FGM) sebagai wadah generasi muda untuk ikut berkontribusi bagi perubahan dan perbaikan penegakan HAM di Indonesia. FGM juga diisi dengan agenda pelatihan-pelatihan agar #kaummudapejuangHAM ini bisa belajar dan berdiskusi tentang strategi serta model kampanye terkait isu pelanggaran HAM. Mereka telah menerbitkan majalah Pallawa dan artikel-artikel yang tersedia secara digital.

PBH NUSRA

Kerja-kerja PBH Nusra berfokus pada konflik sumber daya alam, HAM, serta pendidikan dan bantuan hukum di NTT, khususnya di Kepulauan Flores dan Lembata. Sebagai mitra pelaksana, mereka melakukan pendampingan pada kelompok penyintas pelanggaran berat HAM masa lalu di tiga desa dampingan: Ian Tena, Tua Bao, dan Natarmage. PBH Nusra berupaya mengembalikan harkat dan martabat para lansia dengan membuka ruang-ruang inklusi dan akses untuk pelayanan dan bantuan sosial dari negara.

Mereka juga melibatkan orang muda sebagai relawan yang siap membantu lansia untuk mengakses layanan dasar terutama di bidang kesehatan seperti posyandu lansia, Pemberian Makanan Tambahan (PMT), dan kunjungan rumah. Selain kelompok lansia korban, PBH Nusra juga belajar bersama dengan kelompok lansia pada umumnya dan kelompok perempuan penenun ikat.

TANTANGAN ORGANISASI

- Pergantian aktor politik yang dinamis menghambat proses advokasi dan kerap memaksa upaya advokasi untuk kembali dimulai dari awal.
- Walaupun kebijakan pemerintah terkait penggunaan dana desa dan dana alokasi khusus relevan bagi kerja SID, kebijakan tersebut kurang menyorot inisiatif akar rumput yang mengangkat isu anak.
- Pengetahuan terkait hak dan peningkatan kapasitas masih sulit diakses bagi penghayat kepercayaan Marapu dan masyarakat adat di Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat Daya, khususnya Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kota Waingapu, Umalulua Laura, Wewewa Barat, Kodi, dan Kodi Utara.

INFORMASI TAMBAHAN

• Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan (Indonesia for Humanity)

WEBSITE

www.indonesiauntukkemanusiaan.org

MEDIA SOSIAL

Instagram: @indonesiauntukkemanusiaan

ALAMAT YAYASAN

Jl. Cikini Raya No.43, RT.16/RW.1, Cikini, Kec. Menteng,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10330

• PBH Nusra

MEDIA SOSIAL

Instagram: @PBH5697

ALAMAT YAYASAN

Kota Uneng, Kec. Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur

• Sekber '65

WEBSITE

www.sekber65.org

MEDIA SOSIAL

Instagram: @sekber65

Justice For Disability: Advokasi Hak Disabilitas di Hadapan Hukum

Penyandang disabilitas masih mengalami berbagai hambatan bahkan diskriminasi dalam mendapatkan akses layanan hukum yang berkeadilan. Kondisi ini dipengaruhi oleh dua beberapa faktor. Pertama, kebijakan negara pada isu disabilitas masih didominasi paradigma “sifat kedermawanan”, belum bergeser pada paradigma pemenuhan hak. Penyandang disabilitas ditempatkan sekadar objek yang harus diberi bantuan sosial. Kedua, substansi hukum dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan masih belum inklusif bagi penyandang disabilitas. Misalnya penyandang disabilitas dianggap tidak cakap hukum. Ketiga, aparat penegak hukum belum memahami isu disabilitas beserta kebutuhan penyesuaian saat menangani perkara. Akibatnya penanganan perkara yang terkait penyandang disabilitas sering mengalami hambatan bahkan tidak tuntas.

Kompleksitas isu akses keadilan bagi penyandang disabilitas memerlukan kolaborasi multipihak. Hal ini melatari pembentukan konsorsium Justice for

Disability yang terdiri dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM), LBH Disabilitas Indonesia, Cahaya Inklusi Indonesia, Garamin NTT, BKBH Universitas Mataram, dan Caksana Institute. Justice for Disability berupaya mengadvokasi hak disabilitas dalam layanan hukum agar bisa inklusif dan adil.



Audiensi Justice for Disability dengan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengenai penanganan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas.



Audiensi Justice for Disability dengan Kapolda NTT mengenai penanganan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas.

Konsorsium Justice for Disability menggunakan serangkaian strategi dan pendekatan untuk meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam hukum dan peradilan. Justice for Disability berupaya meningkatkan kesadaran dan komitmen para pemangku kepentingan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Justice for Disability memengaruhi lahirnya kebijakan publik khususnya dalam bidang hukum yang inklusif dan adil. Penyandang disabilitas dilibatkan secara langsung dan dihubungkan dengan pemerintah serta penegak hukum baik dalam penyusunan kebijakan di bidang hukum atau bahkan dalam mendukung penanganan perkara yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas.

Peningkatan kapasitas dalam isu hukum dan disabilitas dilakukan bagi para pengambil kebijakan, aparat penegak hukum, dan juga bagi kelompok penyandang disabilitas. Para pengambil

kebijakan didukung untuk menyusun kebijakan yang dibutuhkan untuk menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Para penegak hukum diberi pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan mengenai disabilitas dan kebutuhan penyesuaian pada saat menangani perkara. Melalui lokakarya bersama para praktisi dan akademisi, penyandang disabilitas mempelajari hak-hak mereka dan kiat mengadvokasi hak-hak tersebut.

Melalui akun Instagram @justicefor-disability.id konsorsium ini melakukan kampanye tentang akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas. Juga sebagai ruang untuk mempublikasikan agenda-agenda yang telah dikerjakan bersama. Dari seluruh upaya bersama ini, konsorsium Justice for Disability mendorong perubahan atau lahirnya kebijakan publik yang inklusif bagi teman-teman penyandang disabilitas.

TANTANGAN ORGANISASI

- Peraturan dan layanan hukum Indonesia belum inklusif bagi kelompok disabilitas. Kondisi ini terlihat misalnya pada kesulitan penyandang disabilitas dalam mengakses layanan hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Kewajiban penilaian personal sebelum pemeriksaan penyandang disabilitas tidak pernah dipenuhi oleh penegak hukum.
- Ruang dialog antara penyandang disabilitas dan penegak hukum masih terbatas, sehingga perubahan kebijakan yang akomodatif belum tercapai.
- Akses penyandang disabilitas terhadap peningkatan kapasitas yang relevan bagi upaya advokasi kebijakan di bidang hukum masih terbatas.

INFORMASI TAMBAHAN

- **Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM)**

WEBSITE

www.pukatkorupsi.ugm.ac.id

MEDIA SOSIAL

Instagram: @pukat.ugm

Instagram: @justicefordisability.id

ALAMAT YAYASAN

Bulaksumur Blok E No. 12, Caturtunggal, Depok,
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Bergandeng Tangan Mewujudkan Ruang Kerja yang Aman

Lingkungan kerja yang tidak aman masih menjadi kenyataan pahit bagi banyak pekerja perempuan dan minoritas gender di Indonesia. Alih alih bekerja dengan tentram untuk menghidupi diri dan sanak keluarga, mereka masih terus dihantui oleh bahaya laten kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja. Belum lagi kondisi upah yang timpang, dan kemungkinan dipecat sewaktu-waktu oleh perusahaan. Oleh karena itu, tumpukan kerentanan ini perlu diadvokasi secara bersama dan melibatkan berbagai pihak.

Menyadari kebutuhan akan regulasi yang berpihak pada perlindungan dan pemenuhan hak pekerja juga lingkungan kerja yang aman dan nyaman, 8 organisasi bekerjasama dan membentuk Konsorsium Advokasi Konvensi ILO 190. Konvensi ILO (International Labour Organization) Nomor 190 (K-ILO 190) diperjuangkan untuk diratifikasi karena merupakan konvensi tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Dengan kata lain, ratifikasi dari K-ILO 190 bisa mendorong hak

setiap orang untuk dapat berada di dunia kerja yang bebas dari kekerasan dan pelecehan, termasuk kekerasan berbasis gender.

Konsorsium ini diupayakan melalui spirit interseksionalitas melalui pelibatan organisasi dan kelompok masyarakat sipil lain yang dirasa punya nafas perjuangan yang anggotanya terdiri dari: Perempuan Mahardika, Serikat Pekerja Nasional (SPN), Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI), Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Serikat SINDIKASI), Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga/JALA PRT, Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia (YAPESDI), dan Konde.co.

Untuk memperkuat kerja-kerja advokasi Konsorsium Advokasi K-ILO 190 menginisiasi kanal Suara Pekerja di <https://www.konde.co/suara-pekerja/> untuk memunculkan suara-suara pekerja perempuan agar lebih didengarkan dan menerbitkan



Audiensi dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan

Buku Panduan Konvensi ILO 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja dan Rekomendasi 206 untuk Perlindungan Pekerja dengan Ragam Gender dan Seksualitas. Buku panduan K-ILO 190 diterbitkan dengan tujuan mendorong adanya pengakuan dan perlindungan pekerja dengan ragam gender dan seksualitas di dunia kerja.

Kerja-kerja pemberdayaan buruh perempuan juga menjadi bagian aktivitas yang dilakukan oleh setiap anggota Konsorsium seperti menyelenggarakan *training*, *workshop*, pertemuan komunitas yang bertujuan meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender dan inklusifitas di dunia kerja.

TANTANGAN ORGANISASI

- Pelecehan, kekerasan seksual, dan pelanggaran hak pekerja menjadi ancaman nyata bagi perempuan pekerja. Ancaman kekerasan berbasis gender di dunia kerja semakin parah bagi pekerja informal, pekerja dengan disabilitas, hingga pekerja minoritas gender dan seksual.
- Muatan Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2022 semakin memperparah kondisi pekerja perempuan, misalnya perihal kontrak kerja yang tidak berkelanjutan atau kontrak kerja yang pendek (3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun) menyebabkan buruh perempuan tidak memiliki kepastian kerja.

INFORMASI TAMBAHAN

KONSORSIUM K-ILO

• Perempuan Mahardika

WEBSITE

www.mahardhika.org

MEDIA SOSIAL

Instagram: @mahardhikakita

Facebook: Perempuan Mahardhika

ALAMAT YAYASAN

Jl. Kedondong I No.39, RT.10/RW.9,
Rawamangun, Pulo Gadung,
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 13220, Indonesia

• Serikat Pekerja Nasional (SPN)

WEBSITE

www.spn.or.id

MEDIA SOSIAL

Instagram: @serikatpekerjanasional

ALAMAT YAYASAN

National Industrial Workers Union Federation
(NIWUF) Gedung ILP Center Lt. 4. Jl. Raya Pasar
Minggu No. 39A Jakarta Selatan 12780

• Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI)

WEBSITE

www.marsinahfm.com

MEDIA SOSIAL

Instagram: @marsinah_fm

Facebook: Marsinah FM

ALAMAT YAYASAN

Jl. Pemadam Terusan No. 33, RT 019/RW 001.
Semper Barat, Jakarta Utara.

• Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN)

WEBSITE

www.kspncenter.com

ALAMAT YAYASAN

Perum Green Aryamukti Residence Jl.
Aryamukti Timur No. 7, Kel. Pedurungan Lor,
Kec. Pedurungan, Kota Semarang.



Audiensi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)

- **Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Serikat SINDIKASI)**

WEBSITE

www.sindikasi.org

MEDIA SOSIAL

Instagram: @serikatsindikasi
Facebook: Serikat Sindikasi

ALAMAT YAYASAN

Jalan Tebet Timur 1 D, No 1,
Tebet Timur, Tebet, Jakarta Selatan
Mobile: 081-1166-2708

- **Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga/JALA PRT**

WEBSITE

www.tungkumenyala.com

MEDIA SOSIAL

Instagram: @jalaprt

ALAMAT YAYASAN

Jl. Bayangkara No. 8, RT 003/RW 005,
Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta 12430

- **Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia (YAPESDI)**

WEBSITE

www.yapesdi.or.id

MEDIA SOSIAL

Instagram: @yapesdi
Facebook: Yapesdi
Linkedin: Yapesdi Indonesia Down Syndrome Care Foundation

ALAMAT YAYASAN

Jl. Bayangkara No. 8, RT 003/RW 005,
Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta 12430

- **Konde.co**

WEBSITE

www.konde.co

MEDIA SOSIAL

Instagram: @konde.co
Tiktok: @konde.co

ALAMAT YAYASAN

Gedung MCD Lantai 4- Jl. Raya Kebayoran Lama No.18CD, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12220

KONSORSIUM IPROTECTNOW

Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya bagi Perempuan Pembela HAM

IPROTECTNOW–Indonesia Protection for WHRD Network, diinisiasi atas kesadaran bahwa perempuan pembela HAM (PPHAM) atau Women Human Right Defender (WHRD) memiliki risiko dan kerentanan khusus atas pekerjaan yang mereka lakukan, terlebih di tengah kebijakan pemerintah yang belum optimal. PPHAM didefinisikan sebagai semua orang yang mengidentifikasi diri sebagai perempuan yang melakukan kerja-kerja terkait pembelaan Hak Asasi Manusia. Kelompok yang menjadi pemangku hak mereka adalah korban kekerasan berbasis gender, termasuk perempuan dengan disabilitas, perempuan lansia, orang muda, masyarakat adat dan minoritas etnis, perempuan dengan HIV/AIDS, maupun minoritas gender dan seksual.

IPROTECTNOW dipelopori oleh konsorsium yang terdiri dari sembilan organisasi lain yang tersebar di enam Provinsi di Indonesia yaitu SAPA Institute, Jaringan Advokasi Jawa Barat, JAKATARUB,



Sosialisasi Protokol Ekosob PPHAM di Bandung

Sinergantara, LBH Apik Jakarta, Yayasan PUPA Bengkulu, Serikat Perempuan Independen Labuhanbatu, SAMMI Institut Semarang, dan Yayasan Lambu Ina di Sulawesi Tenggara. Sembilan organisasi masyarakat sipil ini memiliki fokus kerja yang beragam, namun seluruhnya berfokus pada pendampingan hak perempuan dan kelompok rentan.

Konsorsium ini bekerja sama untuk mendokumentasikan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi oleh perempuan pembela HAM di berbagai daerah di Indonesia, serta mendorong advokasi kebijakan di tingkat daerah dan nasional. Dalam prosesnya, mereka melakukan *need assessment* di daerah-daerah tentang bagaimana kondisi para perempuan pembela HAM, melakukan kelas-kelas peningkatan kapasitas lembaga/organi-sasi pelopor, serta terus membangun dan memperluas jejaring organisasi.

Sebagai jaringan yang baru dengan isu yang belum banyak dikenal orang, IPROTECTNOW berharap bisa menjadi ruang untuk semua perempuan pembela



Dokumentasi kegiatan konsorsium IPROTECT NOW

HAM mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Mereka melakukan pendoku-mentasian visual dan membuat podcast untuk menyebarkan informasi dan pengetahuan tentang perempuan pembela HAM. Bisa disaksikan salah satunya dalam video ini:



Cuplikan video pengenalan IPROTECT NOW untuk Perlindungan WHRD

TANTANGAN ORGANISASI

- Belum ada kebijakan—mekanisme juga program di tingkat nasional maupun daerah dalam perlindungan hak ekonomi, sosial, budaya (EKOSOB) untuk Perempuan Pembela HAM (PPHAM) di Indonesia.
- Peran PPHAM sebagai relawan pendamping korban menyebabkan lahirnya anggapan untuk tidak perlu memenuhi hak-hak EKOSOB-nya.
- Isu perlindungan PPHAM belum dikenali banyak pihak, termasuk PPHAM sendiri.
- Lembaga tempat PPHAM bernaung banyak yang belum memiliki SOP Perlindungan Hak EKOSOB bagi PPHAM sebagai tolak ukur dalam bekerja dengan lembaga-lembaga donor.
- Program jaminan kecelakaan kerja, keselamatan kerja, dan jaminan kesehatan dari BPJS maupun asuransi yang tersedia belum bisa menjawab kebutuhan akan situasi kerentanan yang dialami PPHAM dan keluarganya.

INFORMASI TAMBAHAN

• SAPA Institute

WEBSITE

www.yayasansapa.id

MEDIA SOSIAL

Instagram: @sapa.institute

ALAMAT YAYASAN

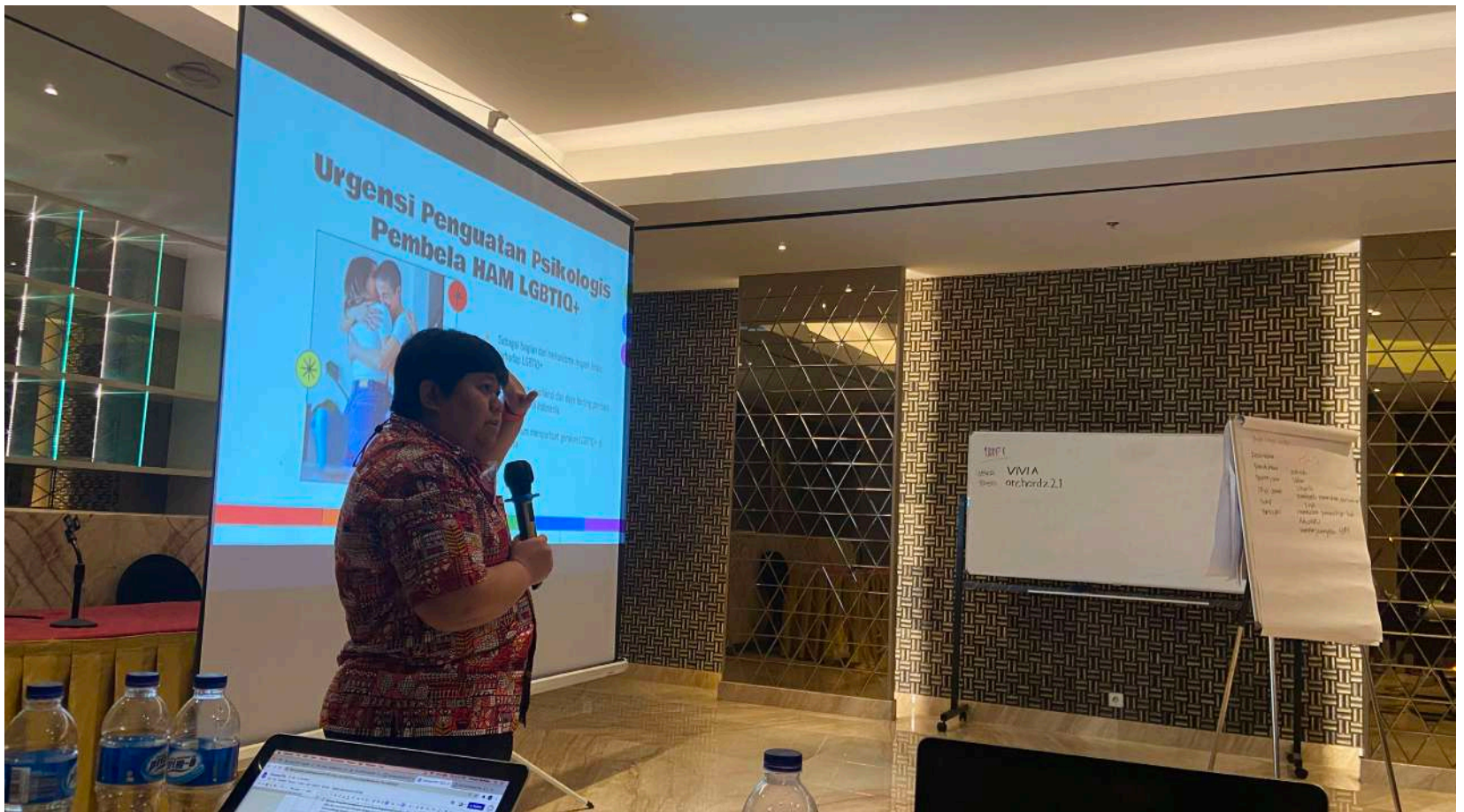
Desa Cipaku, Jalan Ebah RT 01/03, Paseh,
Cipaku, Bandung, Kabupaten Bandung,
Jawa Barat 40383

Buku Panduan Pertolongan Pertama Psikologis Untuk Minoritas Gender dan Seksualitas Pembela HAM di Indonesia

Stigma, diskriminasi, dan represi masih terus dialami oleh kelompok minoritas gender dan seksualitas di Indonesia. Kondisi ini membuat mereka kesulitan untuk mengakses berbagai hal, terutama untuk pekerjaan dan layanan kesehatan. Bagi kelompok minoritas gender dan seksualitas yang bergerak dalam membela Hak Asasi Manusia, kerentanan ini semakin besar karena resiko akan diskriminasi, kekerasan, hingga kriminalisasi dalam aktivisme yang mereka kerjakan sehari-hari. Akibatnya, kondisi psikologis kawan-kawan minoritas gender dan seksualitas pembela HAM begitu terdampak.



Sampul ebook Panduan Pertolongan Pertama Psikologis (Psychological first aid) Bagi Minoritas Gender dan Seksualitas Pembela HAM di Indonesia 2022



Penyusunan Panduan Pertolongan Pertama Psikologis (*Psychological First Aid*) untuk Pembela HAM Minoritas Gender dan Seksual

Konsorsium BRAVE (*Building Resilience of Vulnerable Activist*) dibentuk untuk menanggapi kerentanan ini. Terdiri dari JTID (*Jaringan Transgender Indonesia*), Sanggar Swara, PerEMPUEan, dan *Crisis Response Mechanism*; Konsorsium BRAVE menyusun buku panduan mengenai *Pertolongan Psikologis Pertama (P3)* bagi kawan-kawan minoritas gender dan seksualitas pembela HAM di Indonesia. Selain bertujuan membantu pembela HAM minoritas—khususnya transgender—dalam menjaga kesehatan mental, praktisi terkait juga diharapkan dapat mempergunakan panduan tersebut untuk menjadi lebih inklusif bagi kelompok mereka. Penjelasan kerentanan psikologis pembela HAM, serba-serbi pemberian pertolongan pertama psikologis, pemberdayaan diri sendiri, hingga daftar layanan kesehatan mental tersedia di panduan ini.

Dalam prosesnya, JTID sebagai inisiator BRAVE juga mengajak *Crisis Response Mechanism (CRM)* untuk bekerjasama dalam menyusun panduan dalam upaya respons cepat dan pertama dalam penanganan isu kesehatan mental atau psikologi individu minoritas gender dan seksualitas Pembela HAM di Indonesia, termasuk bagaimana mereka dapat memberikan pertolongan psikologis pertama bagi individu minoritas gender non-pembela HAM yang mereka dampingi. Di samping panduan, Konsorsium CRM, bersama JTID, dan PerEMPUEan juga mengundang profesional kesehatan mental (*psikolog dan psikiater*) untuk memberikan masukan dan pendapat dalam buku panduan, serta teman-teman transgender pembela HAM untuk melatih mereka mempraktikkan pertolongan psikologis sesuai panduan saat melakukan pendampingan maupun diri mereka sendiri.

TANTANGAN ORGANISASI

- Individu minoritas gender pembela HAM menghadapi kerentanan ganda dari upaya aktivisme dan identitasnya. Kerentanan ini mempengaruhi kesehatan mental, resiko kriminalisasi, hingga keamanan.
- Beberapa payung hukum bersifat diskriminatif dan beresiko dijadikan basis untuk mengkriminalisasi rekan-rekan dengan minoritas gender, seperti yang dimuat dalam RKUHP dan UU Ketahanan Keluarga.
- Transgender menerima lebih banyak persekusi dan kekerasan karena cenderung lebih mudah diidentifikasi.
- Ujaran kebencian dan hoaks yang menargetkan minoritas gender, sering menjadi alat untuk meraih dukungan politik.
- Layanan kesehatan mental—dan layanan kesehatan pada umumnya—cenderung tidak ramah bagi individu-individu minoritas gender.

INFORMASI TAMBAHAN

• Sanggar Swara

WEBSITE

www.sanggarswara.org

MEDIA SOSIAL

Instagram: @transchoolswara

• JTID

MEDIA SOSIAL

Instagram: @jaringantransgenderindonesia

ALAMAT YAYASAN

Jakarta Selatan, DKI Jakarta

• PerEMPUan

MEDIA SOSIAL

Instagram: @_perempuan

Mak Ebah dan Berdayanya Lansia Perempuan di Karawang

Hidup berdampingan dengan rasa kesepian merupakan suatu realita umum bagi lansia di beberapa desa di Kabupaten Karawang. Dari hasil pemetaan yang dilakukan oleh Tim Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita (PPSW) Pasoendan Digdaya pada Agustus 2021, hampir 40% lansia tinggal sendirian terpisah dari anak-anak mereka. Banyak juga dari mereka yang kesulitan mengakses layanan kesehatan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pemerintah desa tidak menganggap bahwa lansia perlu difasilitasi kebutuhannya. Dalam konteks pembangunan desa, lansia perempuan menjadi kelompok yang mengalami kerentanan ganda karena tidak pernah dilibatkan dalam pembangunan desa. Padahal, keterlibatan kelompok perempuan lansia dalam perencanaan pembangunan desa dijamin dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Dari hasil sensus penduduk 2020, terdapat 197,56 ribu jiwa atau sebesar 8,10% penduduk lanjut usia di Kabupaten Karawang. Jumlah yang signifikan ini tentunya harus mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah, karena jika dibiarkan, akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai indikator makro pembangunan. Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita Pasoendan Digdaya (PPSW Pasoendan Digdaya) dan FORUM INDONESIA UNTUK TRANSPARANSI ANGGARAN (FITRA JABAR) permasalahan yang dialami oleh Lansia di Karawang bukan hanya pada sektor Kesehatan, namun ada juga yang berkaitan dengan Pendidikan dan ekonomi.



Pertemuan Bulanan Kelompok Nyekar desa-PPSW

Bertautan dengan kebutuhan para lansia dan nihilnya praktik pelibatan lansia oleh pemerintah, perempuan lansia sebenarnya berdaya dan ingin menyuarakan aspirasi mereka. Salah satunya adalah Mak Ebah, lansia perempuan di Desa Curug, Karawang. Di usianya yang ke-56 tahun, Mak Ebah terus berdaya dengan bekerja sebagai buruh tani, mengajak teman-teman lansianya untuk belajar membaca dan menulis, serta aktif menyuarakan isu-isu lansia di forum ANDIL SAHATE. Kiprah Mak Ebah telah direkam dalam dokumenter singkat bertajuk “Lansia dan Lahan: Cerita dari Karawang” yang mengisahkan kegelisahan–serta perjuangan–lansia di tengah arus pembangunan. Karya ini diproduksi melalui kerjasama PPSW Pasoendan Digdaya, ERAT Indonesia, Sedap Films, dan difasilitasi oleh Pamflet Generasi.



Pertemuan Bulanan Kelompok Nyekar desa - PPSW



Pertemuan Bulanan Kelompok Nyekar desa - PPSW

ANDIL SAHATE sendiri merupakan program yang diinisiasi oleh PPSW Pasoendan dan FITRA JABAR untuk menjembatani kelompok lansia dalam menyuarakan aspirasi terkait pembangunan desa. PPSW Pasoendan Digdaya, organisasi dengan fokus pada pendampingan lansia di Karawang, bekerjasama dengan FITRA JABAR sejak Agustus 2021 dalam membentuk program ANDIL SAHATE. Dalam pelaksanaannya, pendampingan dilakukan bukan hanya pada lansia, melainkan juga ke pemerintahan desa, yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa (Pemdes) dalam rangka peningkatan pengetahuan mereka dalam proses pelibatan kelompok rentan melalui Perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender.

Saat ini, jumlah Lansia yang difasilitasi dalam program ANDIL SAHATE sebanyak 320 orang yang terbagi ke dalam 16 kelompok NYEKAR DESA (Nyakola Anggaran Desa). Lokasi program terdapat di 4 Desa 2 Kecamatan yaitu Desa Telukjambe dan Desa Pinayungan Kecamatan Telukjambe lalu Desa Karanganyar dan Desa Curug Kecamatan Klari. Sebagai

langkah awal untuk memberdayakan lansia perempuan, pada September 2021 PPSW Pasoendan dan FITRA JABAR mengadakan forum pertemuan bulanan yang melibatkan lansia, kader lansia, dan keluarga. Peserta bersama-sama menelisik motivasi berkelompok, gender, potensi diri, hak-hak lansia sebagai warga negara, hingga cara menyampaikan aspirasi di forum formal dan informal. Alhasil, lansia perempuan juga mendapatkan ruang untuk saling bertemu dan berbagi, sehingga tidak lagi merasa kesepian.

TANTANGAN ORGANISASI

- Kabupaten Karawang yang dahulu merupakan daerah agrikultur mengalami perubahan pesat hingga kini menjadi zona industri terbesar di Asia Tenggara. Lansia di Karawang terpaksa beradaptasi tanpa adanya pelibatan dan dukungan.
- Agenda pembangunan dan penggunaan dana desa tidak melibatkan lansia—khususnya lansia perempuan. Partisipasi lansia sendiri terhalang minimnya akses dan pengetahuan, rendahnya mobilitas, dan menurunnya kesehatan lansia.
- Tingginya angka lansia soliter beresiko menghambat kualitas hidup dan pemenuhan hak lansia.

INFORMASI TAMBAHAN

- **Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita Pasoendan Digdaya (PPSW Pasoendan)**

WEBSITE

www.ppswpasoendandigdaya.org

MEDIA SOSIAL

Instagram: @ppswpasoendan.official

ALAMAT YAYASAN

Jl. Cemp. Molek, RT.004/RW.004, Jaticempaka,
Kec. Pd. Gede, Kota Bks, Jawa Barat 13620





Rumpun Innovate and Learn

Menjadi inovatif tidak hanya diartikan kemampuan untuk menciptakan cara kerja maupun hal-hal baru; tetapi juga adalah upaya untuk menciptakan ide, gagasan, dan perbaikan terhadap ruang dan sumber daya yang telah tersedia. Di antaranya dengan swasembada pengetahuan lokal, pelibatan orang muda dan penyandang disabilitas, serta terbuka pada segala kemungkinan yang konstruktif. Inilah semangat perubahan yang dipayungi hibah *Innovate and Learn* dari Voice.

Rumpun *Innovate and Learn* terdiri dari tiga penerima hibah yang semuanya bergerak bersama melalui konsorsium dan kerjasama multipihak. Di antaranya Konsorsium Kampung Katong (RMI-Indonesia Institute for Forest and Environment bersama Lakoat.Kujawas, SimpaSio Institute, dan Kolektif Videoge) dengan upaya dekolonisasi, SEHATI Sukoharjo dengan advokasi kebijakan inklusif dan peningkatan kapasitas untuk pekerja dengan disabilitas, juga PELITA Sumba dengan upaya pelibatan perempuan dalam ranah publik dan proses politik.

Solidaritas Bersama Membangun Kampung Katong

“Kami pung manekat, papada, kampong tanga.” Dialek Nusa Tenggara Timur ini artinya semangat kerja bersama untuk membangun kampung. Konsorsium beranggotakan RMI-Indonesian Institute for Forest and Environment, Lakoat. Kujawas, SimpaSio Institute, dan Kolektif Videoge membawa semangat ini dengan menyingkatnya ke dalam nama Kampung Katong—yang juga berarti Kampung Kami.

RMI-Indonesia Institute for Forest and Environment, selaku organisasi yang berfokus pada isu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, melihat bahwa komunitas seperti Lakoat.Kujawas di Mollo, SimpaSio Institute di Larantuka, dan Kolektif Videoge di Labuan Bajo, berada pada benang merah perjuangan yang sama. Perjuangan tersebut adalah mengupayakan dekolonisasi melalui reproduksi pengetahuan lokal secara swadaya dan menanggapi permasalahan

lokal di wilayah masing-masing. Dekolonisasi ini diartikan sebagai proses melepaskan diri dari berbagai pengaruh kolonialisme dengan memposisikan realita lokal sebagai acuan utama menghadapi persoalan komunitas.

Kampung Katong menjadikan dekolonisasi sebagai spirit utama dalam menjawab tantangan gerakan akar rumput di Mollo, Labuan Bajo, dan Larantuka yang identitas serta kearifan lokalnya tergerus arus pembangunan. Residensi antar komunitas, peningkatan kapasitas, dan berbagai agenda lainnya kemudian menjadi rangkaian proses Konsorsium Kampung Katong yang akan berjalan hingga 2023. Adapun proses ini berlangsung dengan menempatkan orang muda, perempuan, masyarakat adat dan minoritas etnis, dan warga lokal sebagai aktor kunci.



Aktivitas Belajar bersama di Skol Tomolok

LAKOAT.KUJAWAS: PRESERVASI PENGETAHUAN ADAT MELALUI PENDIDIKAN KRITIS-KONTEKSTUAL

Ancaman memudarnya tradisi adat dan krisis iklim mendorong Lakoat.Kujawas, sebuah komunitas kewirausahaan sosial di Desa Taiftob, Timor Tengah Selatan, mendokumentasikan pengetahuan lokal sebagai bagian penting dari identitas Masyarakat Adat Mollo. Upaya revitalisasi tradisi tersebut dilakukan melalui pembelajaran tematik di Skol Tamolok—model pendidikan kritis dan kontekstual yang dikembangkan sejak 2019—seperti pendokumentasian resep-resep makanan, preservasi pangan lokal, pengarsipan bibit, mengadakan festival dan pameran budaya, hingga peningkatan kapasitas bagi orang muda lokal. Dengan transfer pengetahuan lintas generasi dan orang muda yang berdaya sebagai generasi penerus, diharapkan bahwa kehidupan Masyarakat Adat Mollo dapat berdaulat secara berkelanjutan.



Aktivitas Pencatatan Pengetahuan Pengobatan Warga oleh Anak-anak Muda di SimpaSio Institute

SIMPASIO INSTITUTE: PENDOKUMENTASIAN PENGETAHUAN PENGOBATAN WARGA

SimpaSio Institute, lembaga pengarsipan dan pengkajian budaya Flores Timur, menggagas Lingkar Belajar SimpaSio Institute yang mewadahi orang muda. Ruang ini memfasilitasi terjadinya produksi pengetahuan lintas generasi yang kontekstual, misalnya perihal modernisasi pengobatan tradisional Nagi Larantuka yang makin asing di mata orang muda lokal. Dalam prosesnya, komunitas ini melakukan pendokumentasian pengetahuan dari warga mengenai ragam, khasiat, dan cara pengolahan obat-obatan tradisional yang biasa dimanfaatkan. Hasil pendokumentasian tersebut kemudian didiskusikan dan diolah bersama sebagai bagian dari reproduksi pengetahuan lokal dengan harapan pengetahuan lintas-generasi ini bisa tetap terjaga.



Aktivitas Anak Muda Kolektif Videoge Merekam Kampung Lama

KOLEKTIF VIDEOGE: ANAK MUDA MEREKAM KAMPUNG LAMA

Sebagai komunitas yang memposisikan dirinya sebagai “laboratorium kreativitas” dalam reproduksi dan pengarsipan pengetahuan lokal, Kolektif Videoge mewujudkan proses belajar mereka dengan cara yang unik, yakni produksi dan distribusi audio-visual. Lokakarya *micro-documentary* atau film dokumenter pendek yang selama prosesnya menggandeng erat keterlibatan orang muda setempat, misalnya, menjadi salah satu metode Videoge untuk lebih mendekatkan mereka dengan kampung halamannya sendiri. Proses belajar ini menghasilkan rangkaian *micro-doc* “Merekam Kampung Air” dengan empat subjudul: Mata Air, Ruang, Sampah, dan Nelayan Pensiun. Selain itu, proses mempelajari pangan lokal juga terjadi melalui pendokumentasian dan produksi buku resep berjudul Resep Tetangga.

TANTANGAN ORGANISASI

- Akses terhadap sumber daya produktif, khususnya sumber daya modal, belum bisa dijangkau secara merata oleh masyarakat adat dan etnis minoritas di Nusa Tenggara Timur. Dalam kasus masyarakat adat, akses terhadap sumber daya alam sendiri pun semakin menipis di tengah pesatnya agenda pembangunan, modernisasi, dan dampak krisis iklim.
- Gerakan orang muda di Nusa Tenggara Timur berkembang pesat, namun tidak beriringan dengan peningkatan kapasitas organisasi yang mencakup kemampuan manajerial, kepemimpinan, hingga perancangan intervensi dan evaluasi. Akibatnya, dampak gerakan dan implementasi program tidak maksimal.
- Masyarakat adat dan etnis minoritas terancam kehilangan berbagai pengetahuan, budaya, dan kearifan lokal yang membentuk identitas komunitas.

INFORMASI TAMBAHAN

KONSORSIUM KAMPUNG KATONG

- **RMI-Indonesia Institute for Forest Environment**

WEBSITE

www.rmibogor.id

MEDIA SOSIAL

Instagram: @rmi.id

Facebook: RMIPage

Twitter: @RMI_id

ALAMAT YAYASAN

Perumahan Bogor Baru Jl. Tegallega,
Blok C1 No. 12A Bogor Tengah 16127

- **Kampung Katong**

MEDIA SOSIAL

Instagram: @bnbindigenous

- **Kolektif Videoge**

WEBSITE

www.maigezine.net/tentang

MEDIA SOSIAL

Instagram: @maigezine

ALAMAT YAYASAN

Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kabupaten
Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.



Pangan yang dikumpulkan oleh peserta Skol Tomolok Lakoat.Kujawas

• Lakoat Kujawas

WEBSITE

www.lakoatkujawas.blogspot.com

MEDIA SOSIAL

Instagram: @lakoat.kujawas

Facebook: lakoat.kujawas

ALAMAT YAYASAN

Desa Taiftob, Kecamatan Mollo, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur

• SimpaSio Institute

MEDIA SOSIAL

Instagram: @simpasioinstitute

Facebook: Simpa Sio Institute

ALAMAT YAYASAN

Sarotari, Larantuka, East Flores Regency, East Nusa Tenggara

Memperjuangkan Kebijakan Inklusif dan Pemberdayaan untuk Pekerja dengan Disabilitas

Meskipun sudah diamanatkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 bahwa perusahaan pemerintah wajib mempekerjakan minimal 2% penyandang disabilitas dan 1% untuk perusahaan swasta, kebanyakan penyandang disabilitas masih terpinggirkan secara ekonomi dan tidak bisa mengakses pekerjaan. Stigma bahwa penyandang disabilitas tidak bisa bekerja masih dipercayai keluarga dan masyarakat pada umumnya. Perkumpulan SEHATI Sukoharjo dengan intervensi melalui Forum Komunikasi Difabel Boyolali (FKDB), Self Help Group (SHG) Karya Manunggal Wonogiri dan Organisasi Penyandang Disabilitas lokal Sukoharjo menanggapi kondisi ini dengan mengupayakan advokasi dan pendampingan.

Salah satu kerja yang diupayakan dalam inisiatif Peningkatan Akses Penghidupan Bagi Penyandang Disabilitas diawali dengan Pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan di Wilayah Sukoharjo, Wonogiri dan Boyolali. SEHATI Sukoharjo bersama SHG dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Wonogiri memberikan pendampingan, pelatihan, dan advokasi bagi Penyandang Disabilitas—baik sebelum atau setelah memasuki dunia kerja—melalui ULD yang memiliki legalitas hukum. Dengan ini, para pekerja dengan disabilitas tidak hanya bisa mendapatkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhannya, namun juga jaminan bahwa hak mereka terkait akses, fasilitas dan akomodasi terhadap Penyandang Disabilitas bisa terpenuhi di hadapan hukum.



Ibu Ristanti Ka.Disnaker Wonogiri Memberikan dukungan pembentukan ULD Ketenagakerjaan Wonogiri

Tidak hanya berhenti di situ, Sehati Sukoharjo menindaklanjuti ULD dengan menghadirkan Workshop Penyusunan Database Pekerja Penyandang Disabilitas. Hasilnya adalah Sistem Informasi Tenaga Kerja Disabilitas (SITEKaD) yang digunakan sebagai sarana mengakses informasi lowongan dan pelatihan pekerjaan oleh perusahaan. Sistem daring ini juga akan dipakai oleh pemerintah dan ULD untuk memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas.

Untuk meningkatkan kapasitas perusahaan dan pemerintah dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas, SEHATI Sukoharjo bekerjasama dengan Disnaker Wonogiri melakukan Pelatihan Sensitivitas Disabilitas. Perusahaan dan ULD Ketenagakerjaan harapnya dapat lebih



Bp. Agustinus Ka. Dispernaker Sukoharjo, SITEKaD menjadi sarana peningkatan akses kerja disabilitas

piawai dalam berinteraksi dengan orang dengan ragam disabilitas fisik, sensorik pendengaran, dan sensorik penglihatan; untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan inklusif.

Untuk meningkatkan kapasitas perusahaan dan pemerintah dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas, SEHATI Sukoharjo bekerjasama dengan Disnaker Wonogiri melakukan Pelatihan Sensitivitas Disabilitas. Perusahaan dan ULD Ketenagakerjaan harapnya dapat lebih piawai dalam berinteraksi dengan orang dengan ragam disabilitas fisik, sensorik pendengaran, dan sensorik penglihatan; untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan inklusif.

Mewujudkan akses terhadap pekerjaan untuk penyandang disabilitas merupakan perjalanan yang panjang. Upaya-upaya seperti ULD dan penyusunan database tetap harus dilengkapi dengan inisiatif akar rumput yang lebih dekat dengan penyandang disabilitas. Salah satunya dengan Pelatihan Menjahit Berstandar Industri dan Quality Control yang bekerjasama dengan perusahaan garmen dan Balai Latihan Kerja (BLK) serta pendampingan bekerja di perusahaan. Selama setahun berkegiatan, 42 penyandang disabilitas bekerja di perusahaan sedangkan, sementara sejumlah peserta lain yang bekerja mandiri. Penguatan kelompok usaha Kresna Patra dan Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (Kube) "Arjuna Karya" di Boyolali juga dilakukan. Mereka dilatih dalam pengelolaan bisnis konveksi serta pemasaran digital. Terdapat juga pembuatan modul interaktif untuk modifikasi mesin jahit bagi pekerja yang menggunakan kursi roda, amputasi kaki kanan dan pekerja dengan tubuh kecil. Harapannya, sembari kebijakan bisa didorong agar lebih akomodatif melalui advokasi, penguatan penyandang disabilitas terus berjalan.



Bp. Tino penyusun database menjelaskan Sistem informasi tenaga kerja disabilitas



Narasumber LPK PT. Pan Brothers, Boyolali menjelaskan bagaimana proses menjahit dan bekerja di perusahaan



Pembentukan Unit Bisnis Arjuna Karya Boyolali dan pelatihan pemasaran digital

TANTANGAN ORGANISASI

- Beragam diskriminasi hadir karena stigma bahwa penyandang disabilitas tidak bisa digdaya masih kuat mengakar di keluarga, masyarakat, hingga pemerintah.
- Implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 belum berdampak pada akses penyandang disabilitas terhadap lapangan pekerjaan.
- Pada banyak kasus, lingkungan kerja belum siap dan inklusif bagi pekerja dengan disabilitas. Ini mencakupi akomodasi dan aksesibilitas yang ramah disabilitas, serta pengetahuan terkait interaksi dengan pekerja dengan disabilitas.
- Peningkatan kapasitas untuk penyandang disabilitas agar siap memasuki dunia kerja sulit ditemukan.
- Pekerja dengan disabilitas masih mengalami diskriminasi di lingkungan kerja karena minimnya pengetahuan terkait disabilitas.

INFORMASI TAMBAHAN

• Perkumpulan SEHATI Sukoharjo (SEHATI)

WEBSITE

www.sehatidifabel.blogspot.com

MEDIA SOSIAL

Instagram: @sehatisukoharjo

Facebook: SEHATI Sukoharjo

Youtube: Sehati Sukoharjo TV

ALAMAT YAYASAN

LBK Sukoharjo Jl. Serang 11b, Larangan Rt.03/01

Gayam Sukoharjo Jawa Tengah 57514, HP. 082 2650 34295

Berdaya Bersama Tanpa Pandang Gender dan Kasta

Lika Inga adalah perempuan berusia 34 tahun dan berasal dari golongan kasta terendah Sumba Timur yang terpilih menjadi ketua RT pada tahun 2017. Sebelumnya, belum pernah ada perempuan, apalagi dari kasta terendah, yang terlibat dalam struktur pemerintahan desa.

Lika Inga adalah ibu dari tiga anak orang anak yang selama ini hidup terkungkung dalam adat budaya dan peran domestik. Ia menikah melalui perjodohan di usia muda dengan laki-laki yang berasal dari kasta yang sama dengannya. Namun, Lika Inga tak pernah menyerah untuk berusaha melampaui peran domestiknya. Salah satu kegiatan yang diikuti oleh Lika Inga adalah program Praingu Yang Berkelanjutan dan Inklusif sebagai fasilitator desa. Program ini diinisiasi oleh Perkumpulan Humba Hammu dinahkodai oleh Lembaga Pelita Sumba untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adat, khususnya perempuan, orang muda, lansia, dan orang-orang dengan disabilitas.

Jaringan Humba Hammu merupakan sebuah kelompok jejaring organisasi di Sumba yang memiliki keahlian khusus dalam pengarusutamaan gender dan hubungannya dengan isu sosial yang terjadi di masyarakat terutama mengenai akses energi terbarukan dan keahlian di bidang advokasi, isu ketahanan pangan, masyarakat adat, konservasi sumber daya alam, pendidikan, perempuan dan anak juga media. Dalam aktivitasnya, jaringan ini bekerjasama dengan multipihak. Salah satunya dengan Hivos Sumba Iconic Island sejak 2016 melalui berbagai kegiatan peningkatan kapasitas dalam Gender Action Learning for Sustainability (GALS). Antara tahun 2016-2020, akumulasi pengetahuan, pelajaran, dan pendekatan serta metode yang telah dipelajari



Pelatihan GALS Katalis bagi masyarakat



Proses Pewarnaan Benang



Konsorsium Humba Hammu saat mengikuti Learning Event Tingkat Provinsi HIVOS Indonesia yang dihadiri pula oleh Bupati dan BAPPEDA Sumba Timur



Pemaparan hasil refleksi GFP yang di fasilitasi HIVOS

oleh para anggota disebarluaskan melalui tingkatan rumah tangga dan komunitas. Orang-orang seperti Lika Inga di Sumba Timur-lah yang menjadi napas dari semangat program ini.

Untuk mencapai itu, PELITA dan Humba Humma melakukan pelatihan menggunakan metode GALS Building Movement dalam proses pendampingan fasilitator desa. Sebagai metodologi pemberdayaan berbasis komunitas, GALS digunakan untuk perencanaan pribadi maupun kolektif dalam membangun kesadaran bersama dan perubahan salah satunya terkait ketimpangan relasi kuasa. Aksi dan advokasi bersama dalam gender dan energi terbarukan menjadi salah dua fokus utama pelatihan.

Adapun tujuh lembaga yang tergabung dalam konsorsium Humba Hammu, yakni Lembaga Pelita Sumba, Yayasan

Peduli Kasih (SANDIKA), Yayasan Bahtra, Yayasan Satu Visi, Yayasan Pengembangan Kemanusiaan Donders (YKPD), Perkumpulan Humba Ailulu, Perkumpulan Sabana Sumba. Terlibat pula Koalisi Perempuan Indonesia menjadi fasilitator dalam kegiatan ini. Pesertanya berasal dari tiga desa dampingan, yakni Desa Luku Wingir di Kecamatan Kambata Mapambuhang, Desa Maubokul di Kecamatan Pandawai, dan Desa Kamanggih di Kecamatan Kahaungu Eti. Program ini juga bekerjasama dengan pemangku kepentingan utama yakni pemerintah di empat kabupaten di Sumba yang meliputi enam desa percontohan administrasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setempat.

TANTANGAN ORGANISASI

- Proses pembangunan lingkungan yang berkelanjutan di Sumba belum berprinsip keadilan dan partisipatif, khususnya bagi perempuan adat dan dari kasta rendah. Minimnya akses untuk berpartisipasi dan untuk peningkatan kapasitas menjadi dua penyebab utama.
- Pencarian funding atau pendanaan yang bisa mendukung inisiatif pemberdayaan masyarakat rentan tergolong sulit karena adanya kendala bahasa.
- Aspirasi masyarakat Sumba yang kebanyakan mengedepankan hukum adat belum diakomodir, atau bahkan terdengar, oleh pemangku kepentingan di skala nasional; sehingga kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi masyarakat adat tidak sepenuhnya mensejahterakan.

INFORMASI TAMBAHAN

• Lembaga Peduli Sejahtera dan Lestari (PELITA) Sumba

WEBSITE

www.sumbapelita.blogspot.com

MEDIA SOSIAL

Facebook: PELITA Sumba

ALAMAT YAYASAN

Jl Wai Lolung, Desa Anajiaka, Kec. Umbu Ratu Nggay Barat,
Kabupaten Sumba Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

PAMFLET GENERASI

Saling Terhubung Saling Belajar

Perkumpulan Pamflet Generasi merupakan organisasi orang muda yang berfokus pada memperkuat partisipasi orang muda dalam proses gerakan sosial. Sebagai organisasi youth-led atau dipimpin oleh orang muda, Pamflet menawarkan akses terhadap berbagai pengetahuan alternatif dan peningkatan kapasitas bagi orang muda, serta menguatkan dan menghubungkan jaringan orang muda dari berbagai penjuru Indonesia. Sejak akhir 2020, Pamflet berperan sebagai fasilitator Linking and Learning yang kini berkembang menjadi Jaringan Indonesia Inklusi.

Awalnya, pada 2017-2019, Pamflet bekerja sama dengan Gerkatina Kepemudaan (Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia-Kepemudaan) serta Sedap Films dalam menggagas program Ini Cerita Kita. Program ini menanggapi peminggiran penyandang disabilitas dalam berbagai sektor kehidupan sehari-hari di Indonesia, baik di ranah sosial ekonomi maupun pemenuhan hak dalam mengakses fasilitas publik. Ini Cerita Kita mengkreasikan program penguatan kapasitas orang muda tuli yang mencakupi kampanye dan persiapan kerja, belajar membuat situs web, pembuatan film pendek, sampai kunjungan ke sekolah dan komunitas. Film dan vlog yang dilahirkan dari pelatihan tersebut lalu dipakai sebagai amunisi kampanye dan advokasi Gerkatina Kepemudaan.

Dengan perannya sebagai organisasi yang bertolak pada aktivisme orang muda, Pamflet berkesesuaian dengan kebutuhan Linking and Learning sebagai sistem pendukung yang menyokong kekhasan gagasan, isu, dan inisiatif yang diimplementasikan oleh puluhan penerima hibah. Jembatan untuk para penerima hibah



agar dapat saling terhubung dan belajar dihadirkan Pamflet melalui beragam kegiatan pertemuan, sesi belajar, pembuatan produk pengetahuan kolaboratif, hingga berbagai kegiatan kolaborasi.

Salah satu proses belajar yang berperan besar adalah pembentukan tiga kelompok belajar—kelompok advokasi, kampanye media kreatif, dan ketahanan ekonomi—yang sesuai dengan kebutuhan anggota jaringan. Ini dilengkapi dengan pertemuan lokal, pertemuan nasional, hingga pertemuan *stakeholder*. Berbagai pengalaman dan cerita anggota jaringan juga diwadahi melalui kanal website, Instagram, dan Youtube Indonesia Inklusi.



Dari Kiri ke kanan: 1) Suasana *Sharing Session* Pertemuan Lokal DUA Regional NTT, NTB, dan Sulawesi; 2) Suasana Kegiatan *Workshop* Pembuatan Menstrual/*Female Hygiene Products* bersama *Biyung Indonesia*

Beberapa diantaranya adalah dalam dua jilid buletin *Indonesia Inklusi*, lima film dokumenter, dua komik, hingga video-video edukatif. Selama dua tahun menjadi bagian dari *Keluarga Linking and Learning Voice*, Pamflet menyadari bahwa saling terhubung dan belajar adalah kata kunci utama dalam kerja setiap organisasi masyarakat sipil. Semangat inklusi dan interseksionalitas menjadi dua hal yang terus dipelajari bersama seluruh anggota *Jaringan Indonesia Inklusi*.

Ucapan Terima Kasih

Kami sangat mengapresiasi segala bentuk kerja sama dan bantuan yang telah diberikan berbagai pihak di bawah ini hingga Katalog Keluarga Indonesia Inklusi 2022 dapat terbit.

Voice & Linking and Learning

Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial

Seluruh penerima hibah Voice tahun 2020 sampai 2022. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk kami wawancarai untuk keperluan pembuatan katalog ini.

Kami juga mohon maaf sebesar-besarnya terhadap penerima hibah Voice lain yang belum bisa masuk dalam katalog ini karena keterbatasan kami.



Dibuat Oleh:



Atas Dukungan:

